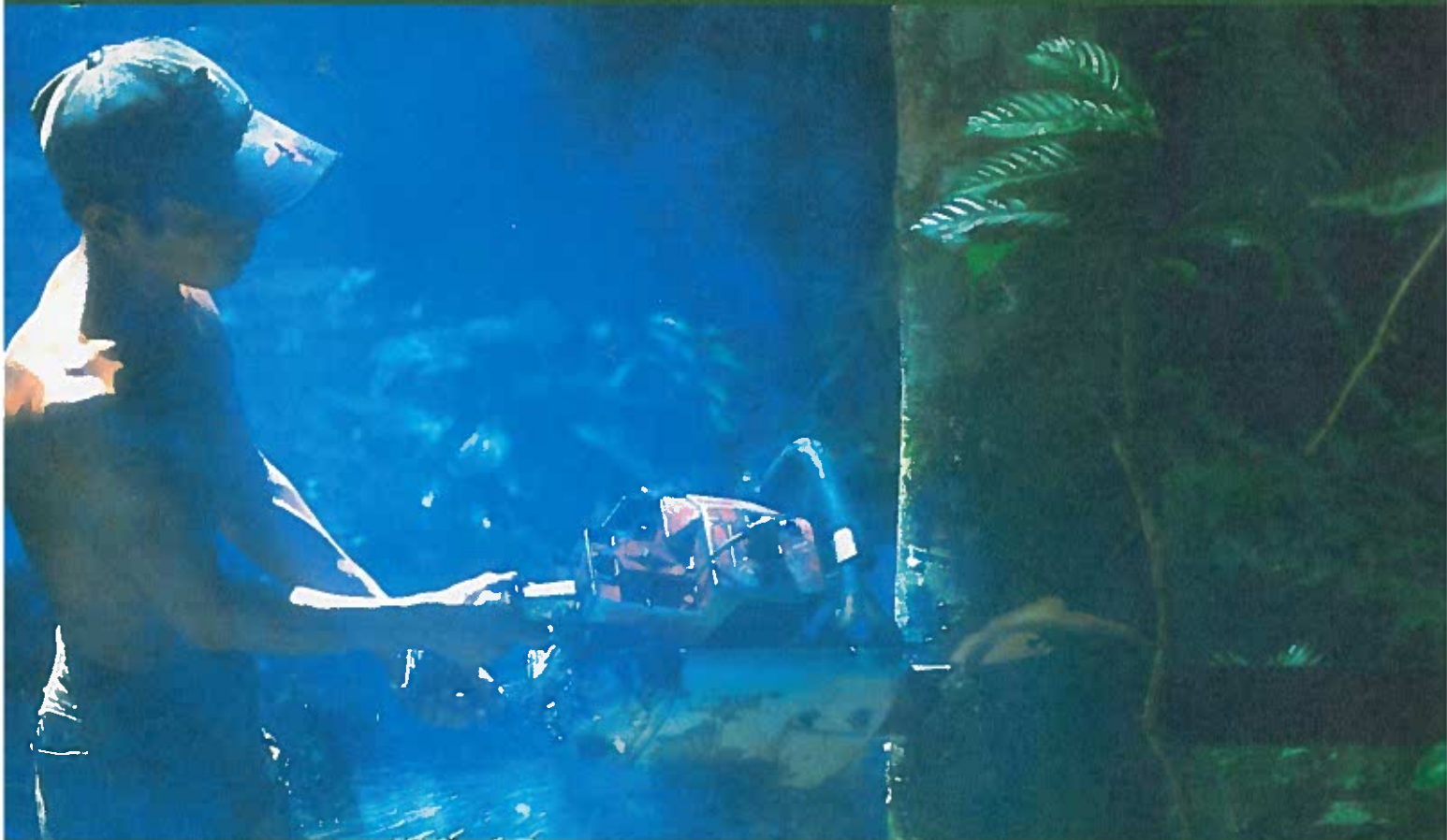


THE FINAL CUT



Illegal Logging in Indonesia's Orangutan Parks
Penebangan Liar di Kawasan Perlindungan di Indonesia

eia
environmental investigation agency

**TELAPAK
INDONESIA**

Contents

Introduction	1-2
Indonesia's Disappearing Forests	3-6
Towards Real Forest Reform	7-11
Tanjung Puting National Park	12-28
Gunung Leuser National Park	29-39
Conclusions and Recommendations	40-41
References	Back Cover
Pengantar	1-2
Punahnya Hutan Indonesia	3-6
Menuju Reformasi Kehutanan yang Sejati	7-11
Taman Nasional Tanjung Puting	12-28
Taman Nasional Gunung Leuser	29-39
Kesimpulan dan Rekomendasi	40-41
Referensi	Back Cover

Daftar Isi

Acknowledgements

EIA would like to thank the Barbara Delano Foundation, the John Ellerman Foundation, and the Rufford Foundation for their continuing support.

Telapak would like to thank Kemala BSP, the World Resources Institute and NRM-EPIQ for their valuable support.

EIA/Telapak thank all those who assisted in the production of the report, while recognising that responsibility for the content rests with the two organisations alone. Special thanks to: Betang Borneo, Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme, LMU-LDP, OFI, WALHI, WALHI Kalteng, YLL, YPSK, Rina Agustine, Bara, Charles V. Barber, Suwanna Gauntlett, Martin Hadiono, Harijono, Harry Kartiwa, Hariadi Kartodihardjo, Pete Knights, F. Rajid Malley, Mapala Comodo FE-univ. Palangkaraya, Abdon Nababan, Noordin, Arifin Pakpahan, Arbi Valentinus, M. Taufik Wahab, Yuli.

Written by Julian Newman, A. Ruwindrijarto, Dave Currey and Hapsoro. Edited by Julian Newman. Additional research by Faith Doherty, Ghonjess and Juliana Ruhfus.

Photo research by Matthew Snead and Danny Beck

Translation by Maria Adriana Sri Adhiati

Design by Presentation Design Ltd.

Many thanks to Brian Emmerson and all at Emmerson Press for the printing of this report (Emmerson Press tel: 01926 854400). Printed on 100% recycled paper

Cover photo shows illegal logging in Gunung Leuser National Park, by A. Ruwindrijarto - EIA/Telapak.



*Left:
Gistok believed to have
been killed by illegal
loggers*

*Gistok yang diyakini
telah dibunuh oleh para
penebang liar*



© Dave Currey

Introduction

When staring into the eyes of our closest relatives, the Great Apes, innocence and wisdom is reflected back at our complicated lives. Gistok, a famous orangutan from Tanjung Puting National Park, would spend hours with visitors to the park – playing, watching, learning and teaching. His innocence was shattered when he disappeared, probably killed by illegal loggers. Perhaps the reflection in his eyes was too frightening.

Indonesia has entered a period of great change and has the opportunity to move towards social and environmental justice. Many of its vast forests have already been wrecked by companies owned by the few businesses that benefited from collusion, corruption and nepotism during the Soeharto regime. Local people have been oppressed by these companies, often through the authoritarian apparatus of the police, army and forest department. Across Indonesia, the situation is so bad that illegal logging now outstrips legal timber production.

It is no wonder that thousands of people have reacted to the current political void by taking the law into their own hands. But this is not a simple grassroots uprising, it is orchestrated by the very same people who have made their fortunes during the Soeharto era – timber barons who encourage this lawlessness for their own financial gain. EIA and Telepak's investigations have identified some of these people who must be dealt with immediately. Their factories and sawmills must be closed down and corrupt individuals in authority who protected them must be replaced.

Immediate action is necessary by the government of Indonesia to stop the illegal logging of Tanjung Puting and Gunung Leuser National Parks. The international community, including the USA, the European Union, Japan, the IMF and World Bank should support such action and provide support for initiatives that give the local communities genuine benefits from these areas. This is an opportunity for the political elite and

Pengantar

Ketika menatap mata kerabat terdekat kita, Kera Besar, kepolosan dan kebijakan terpantul kembali kepada kehidupan kita yang rumit. Gistok, orangutan yang terkenal di Taman Nasional Tanjung Puting, menghabiskan waktu berjam-jam bersama dengan pengunjung Taman Nasional – bermain, menonton, belajar dan mengajarkan pengalamannya. Harmoni itu berantakan ketika ia menghilang, barangkali ia dibunuh penebang liar. Barangkali pantulan di matanya terlalu mengerikan untuk dilihat.

Indonesia memasuki suatu masa perubahan besar yang membuka kesempatan untuk menuju keadilan sosial dan lingkungan. Sebagian besar hutannya yang luas telah dirusak oleh perusahaan dan konglomerat yang memetik keuntungan dari kolusi, korupsi dan nepotisme selama rejim Soeharto. Masyarakat setempat ditindas oleh perusahaan-perusahaan tersebut, kerap kali melalui tangan aparat pemerintah seperti polisi, militer dan petugas departemen kehutanan. Produksi kayu dari penebangan liar di Indonesia pada saat ini sudah melebihi produksi kayu dari perusahaan hutan yang resmi.

Tidak heran jika ribuan orang bereaksi dengan cara main hukum sendiri dalam masa kekosongan politik ini. Akan tetapi ini bukan sekedar gejala gerakan-dari-bawah biasa. Tindakan main hukum sendiri ini didalangi oleh pelaku yang sama dengan mereka yang meraup keuntungan selama masa pemerintahan Suharto. Mereka adalah para raja kayu yang mendorong tindak pelanggaran hukum ini untuk keuntungan finansial mereka semata. Investigasi yang dilakukan oleh EIA dan Telapak telah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Mereka harus ditindak secepatnya. Pabrik-pabrik dan sawmill mereka harus ditutup, para pejabat yang korup, para *beking*, harus dipecat.

Tindakan segera perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting dan Gunung Leuser. Masyarakat internasional, khususnya USA,



Above:
Illegal logger in Gunung
Leuser National Park

Para penebang liar di
Taman Nasional
Gunung Leuser

international donors to prove that they really believe in reform. It will take courage and determination as the people behind the illegal logging wield financial and political influence.

EIA and Telapak actively encourage legislative changes that provide communities with greater benefits from the forestry sector and take it out of the hands of corrupt and arrogant timber barons and civil servants. Legitimate land claims by indigenous people must be addressed by returning the land to them or providing sufficient compensation.

Gistok lived in the only protected area for orangutans in Central Kalimantan. Many local people still treasure its protected status and are horrified at the blatant lawlessness that now infects the area. In the Kluet Swamp in Sumatra people have genuine grievances, but the decimation of this unique area is driven by the same forces that created their problems. This report confirms beyond doubt that Indonesia's orangutans are being pushed ever closer to extinction.

Both of the National Parks featured in this report can provide long term community support through their very uniqueness. They are part of the local heritage and of international significance. Tourism, research and their ability to attract innovative development programmes provide the local communities with a real opportunity for the future, but not if they continue to be destroyed.

Indonesia has enormous areas given over to logging concessions – many of which are now under scrutiny. These areas can provide communities with long-term forestry income if the new government is prepared to break down the power elite control over them.

The final cut of a chainsaw takes the last breath of life from the forest as the tree crashes through the undergrowth. Illegal logging in these National Parks is rapidly removing any future for the forest, its wildlife and the local communities. It serves only to fund the lavish lifestyles of the timber barons directing the destruction.

Masyarakat Eropa, Jepang, IMF, dan Bank Dunia, selayaknya mendukung tindakan tersebut, terhadap setiap upaya yang menciptakan manfaat bagi masyarakat lokal di kawasan ini. Ini merupakan peluang untuk elit politik dan donor internasional untuk membuktikan bahwa mereka percaya terhadap reformasi. Pada gilirannya itikad ini akan memberikan tekad dan kepastian karena mereka yang mendalangi penebangan liar menggunakan pengaruh finansial dan politis.

EIA dan Telapak secara aktif mendorong perubahan legislatif dan kebijakan agar masyarakat mendapat lebih banyak keuntungan dari sektor kehutanan dan menyingkirkan para raja kayu dan pegawai negeri yang korup dan angkuh. Tanah yang dituntut oleh masyarakat adat harus diperhatikan dengan mengembalikan lahan kepada mereka atau dengan menyediakan kompensasi yang layak.

Gistok tinggal dan hidup di satu-satunya kawasan lindung untuk orangutan di Kalimantan Tengah. Masyarakat lokal masih menghargai status tersebut dan mereka dengan getir menyaksikan kesewenang-wenangan yang kini merajalela di kawasan tersebut. Masyarakat setempat di Aceh Selatan sungguh-sungguh prihatin akan kondisi Rawa Kluet. Akan tetapi, perusakan besar-besaran di kawasan yang unik tersebut didorong oleh kekuatan yang sama dengan yang menciptakan masalah mereka. Laporan ini menegaskan bahwa orangutan Indonesia semakin menuju kepunahan.

Kedua taman nasional yang ditampilkan pada laporan ini sebenarnya mampu mendukung kehidupan masyarakat dalam jangka panjang melalui keunikan keduanya. Kedua taman nasional ini merupakan bagian dari warisan lokal dan memiliki arti penting secara internasional. Pariwisata, penelitian, dan potensi lain taman nasional tersebut untuk menarik program pembangunan yang inovatif memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dimasa depan. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika taman nasional itu terus dirusak.

Daerah yang dinyatakan sebagai kawasan penebangan hutan sangatlah luas – banyak diantaranya kini dibawah pengawasan ketat. Kawasan tersebut dapat memberikan pendapatan hasil hutan kepada masyarakat dalam jangka panjang jika pemerintah yang baru siap untuk membongkar kendali kekuasaan elit terhadap kawasan tersebut.

Potongan terakhir dari *chainsaw* merenggut napas terakhir dari hutan ketika pohon tumbang ke semak-semak. Penebangan liar di taman nasional-taman nasional ini dengan cepat merampas masa depan hutan, kehidupan alamnya dan masyarakat setempat, hanya untuk memuaskan gaya hidup mewah para raja kayu yang mendalangi perusakan.

Dave Currey
EIA Director

A. Ruwindrijarto
Telapak Indonesia
Director

August 1999

*Left:
The fires of 1997 and
1998 raged through
Indonesia's fragile forests*

*Kebakaran hutan tahun
1997 dan 1998 melanda
hutan Indonesia yang
rentan*



© Dave Curry - EIA

Indonesia's Disappearing Forests

The forests of Indonesia are in the midst of a deepening crisis. After decades of unsustainable logging which saw the government take over control of the forests and virtually give huge tracts away to former President Soeharto's family and business cronies, the terrible forest fires of 1997 and 1998 finally focused world attention on the rapacious deforestation taking place in Indonesia.

Yet while limited reforms have been implemented over the last year, it is still business as usual for most of the timber barons. The economic crisis wracking Indonesia has put additional pressure on the forests, as people across the country have been forced into desperate measures to survive.

Indonesia's tropical forests are of global importance, ranked second in terms of size to those of Brazil and covering over 100 million hectares in 1995 ⁽¹⁾. Ten per cent of the world's remaining tropical forest cover is found in Indonesia ⁽²⁾. Yet these forests have been disappearing at a rate of more than two million hectares every year ⁽³⁾, and 72% of the country's original frontier forest has already been lost ⁽⁴⁾.

The forests bore the brunt of the worst excesses of the Soeharto regime. The former president and his close family and associates controlled around 7.14 million hectares of forests through stakes in 27 timber companies and forest estates ⁽⁵⁾. Under the old regime close friends of the president like Bob Hasan were able to control vast swathes of forest. Hasan's empire covered 3 million hectares while another close ally Prayogo Pangestu was able to acquire around 3.5 million

Punahnya Hutan Indonesia

Hutan Indonesia sedang mengalami krisis yang semakin dalam. Sistem pengusahaan hutan yang tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah Indonesia telah mengambil alih penguasaan hutan dari rakyat dan memberi peluang sebesar-besarnya kepada keluarga mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya untuk menguras kekayaan hutan. Kebakaran hutan tahun 1997 dan 1998 pada akhirnya menarik perhatian masyarakat dunia akan tindak penjarahan hutan yang merajalela ini.

Beberapa perubahan telah diterapkan sejak tahun lalu. Namun perubahan yang masih terbatas ini nyaris tidak berarti bagi sebagian besar raja kayu. Krisis ekonomi yang memporakporandakan Indonesia semakin membebani hutan, terutama ketika masyarakat di seluruh penjuru Indonesia terpaksa harus mencari upaya untuk bertahan hidup dari hari ke hari.

Hutan tropis Indonesia memiliki arti yang sangat penting secara global, menempati urutan kedua terbesar setelah Brazil dan mencakup area 100 juta hektar pada tahun 1995 ⁽¹⁾. Sepuluh persen dari hutan tropis dunia yang tersisa terdapat di Indonesia ⁽²⁾. Namun hutan ini terus menyusut dengan kecepatan lebih dari 2 juta hektar per tahun ⁽³⁾. 72% dari hutan asli Indonesia telah punah ⁽⁴⁾.

Hutan Indonesia paling menderita dibawah rejim Soeharto. Mantan presiden tersebut beserta keluarga terdekatnya dan para kroni menguasai 7,14 juta hektar hutan melalui 27 perusahaan kayu dan pengelolaan hutan ⁽⁵⁾. 'Kerajaan' Bob Hasan, kroni yang paling dekat, menguasai wilayah hutan yang sangat luas, paling tidak sekitar 3 juta hektar. Kroni yang lain,

“illegal logging accounted for 32 million cubic metres of timber every year, compared with an official production of 29.5 million cubic metres”

hectares through his Barito Pacific Timber Group, Indonesia's largest forestry company ⁽⁶⁾.

The fires that swept through Sumatra and Borneo in 1997 and 1998 were largely caused by timber and plantation companies clearing land. Satellite monitoring allowed the identification of 176 firms accused of deliberately setting fires to make way for timber or oil palm plantations, although few have so far faced charges ⁽⁷⁾. The damage caused to the remaining forests is much worse than feared at the time. Sophisticated satellite analysis has shown that four million hectares of land were damaged in the province of East Kalimantan alone, compared with the official estimate of 500,000 hectares ⁽⁸⁾.

The Scale of Illegal Logging

The forestry sector in Indonesia is fundamentally corrupt and riddled with illegalities. Analysis reveals that the amount of timber from illegal sources outstrips that from legal operations, while in the mid-1990s 84% of timber concession holders failed to obey the rules ⁽⁹⁾.

A recent report by the Indonesia – UK Tropical Forest Management Programme found that illegal logging accounted for 32 million cubic metres of timber every year, compared with an official production of 29.5 million cubic metres ⁽¹⁰⁾. This is equivalent to 800,000 hectares of forest being illegally logged every year.

The report identified illegal logging of natural forest as the primary source of logs, accounting for 52% of the total. Official production from selective logging and conversion of natural forests amounts to 26 million cubic metres, or 43% of total supply.

The scale of illegal logging is largely a legacy of the unrestrained expansion of the timber pro-

Prayogo Pangestu, mampu menguasai 3,5 juta hektar melalui kelompoknya, Barito Pacific Timber Group, perusahaan pengelola hutan terbesar di Indonesia ⁽⁶⁾.

Kebakaran yang telah menyapu Sumatra dan Borneo pada tahun 1997 dan 1998 sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan kayu dan perkebunan. Pemantauan melalui satelit telah mengidentifikasi 176 perusahaan yang dituduh menyulut api dengan sengaja untuk membuka lahan untuk penebangan hutan atau untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, sejauh ini hanya beberapa perusahaan saja yang ditindak atau diharuskan membayar denda ⁽⁷⁾. Kerusakan pada kawasan hutan yang tersisa ternyata jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan pada saat kejadian. Hasil analisis satelit yang canggih menunjukkan bahwa di Propinsi Kalimantan Timur saja terdapat empat juta hektar lahan yang rusak, jauh melebihi perkiraan resmi 500.000 hektar ⁽⁸⁾.

Skala Penebangan Kayu Liar

Sektor perhutanan di Indonesia pada dasarnya korup dan penuh dengan praktek-praktek ilegal. Sebuah studi menunjukkan bahwa jumlah kayu dari sumber ilegal jauh melebihi kayu dari praktek legal. Pada pertengahan 1980an saja 84% pemegang konsesi/HPH melanggar peraturan ⁽⁹⁾.

Laporan terakhir oleh Indonesia – UK Tropical Forest Management Programme menemukan bahwa penebangan liar menghasilkan 32 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, melebihi produksi resmi yang berjumlah 29,5 juta meter kubik ⁽¹⁰⁾. Angka ini menandakan bahwa 800.000 hektar hutan ditebang secara liar setiap tahunnya.

Laporan tersebut menemukan juga bahwa penebangan hutan alami secara liar merupakan sumber utama kayu bulat, yaitu sekitar 52% dari jumlah kayu tebang secara keseluruhan. Sementara produksi resmi dari penebangan kayu selektif dan konversi hutan alami mencapai jumlah 26 juta meter kubik, atau 43% dari suplai keseluruhan.

Merajalelanya penebangan liar di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari tidak adanya pembatasan pada sektor pengolahan kayu. Industri pengolahan kayu bisa membutuhkan hampir 80 juta meter kubik kayu bulat setiap tahunnya, sedangkan suplai resmi hanya mampu menyediakan 29,5 juta meter kubik, jauh dibawah permintaan sesuai kapasitas terpasang industri pengolahan kayu tersebut.

*Below:
Huge tracts of natural forest have been replaced with oil palm plantations*

Kawasan hutan alam yang luas telah bertukar wajah menjadi perkebunan kelapa sawit



cessing sector in Indonesia. While the voracious processing industry can consume almost 80 million cubic metres of logs each year, official supply can only provide 29.5 million cubic metres, creating a huge shortfall.

The report concluded: "Demand for roundwood now greatly exceeds sustainable supply, the forest estate is shrinking, plantations are falling short of production targets, and a lack of control over the resource means that absolutely no demand goes unmet.

"The net result is that unless action is taken immediately the forest will disappear forever, taking with it the myriad benefits that it provides to the Indonesian people and the Indonesian economy."

Such a finding has dire implications for the future welfare of the 60 million Indonesian people who are dependent on the forests ⁽¹¹⁾.

Biodiversity Under Threat

Indonesia's forests are home to one of the most astonishing ranges of biodiversity in the world. The archipelago sprawls across two distinct biological regions – the Asian and Melanesian-Australian realms – and has more mammal species than any other country.

The country contains 17% of the world's bird species, 16% of reptiles, 12% of mammals and 10% of plants. Yet the pace of deforestation has caused a lengthening list of these species to be classified as endangered. Indonesia has more species threatened with extinction than any other country, with 128 mammal species and 104 bird species under threat ⁽¹²⁾.

The list of threatened mammals includes the Sumatran rhinoceros, clouded leopard, sun bear, proboscis monkey, Sumatran tiger, and orangutan. The greatest threat to many of these animals is habitat destruction. Of the 29 primate species found in Indonesia 20 were discovered to have lost more than half their original habitat ten years ago ⁽¹³⁾. The situation has certainly become more desperate over the last decade.

On paper Indonesia has an extensive system of conservation areas to protect its unique biodiversity, covering 19 million hectares or 13% of the forests ⁽¹⁴⁾. The country has 37 national parks, but in reality many of these are under attack from economic interests.

This report examines the effect of commercial scale illegal logging in two of Indonesia's prized parks, but the situation is just as dire in almost all of the protected areas. Logging and mining activities have been encroaching on the park areas for a long time, but the scale of destruction is rising dramatically and seriously threatening

Laporan tersebut menyimpulkan:

"Permintaan kayu bulat saat ini sudah jauh melebihi suplai yang berkelanjutan, kawasan hutan sudah semakin menyusut, perkebunan gagal memenuhi target produksi. Kurangnya pengawasan akan pengelolaan sumber daya hutan akan berarti bahwa sudah pasti semua permintaan akan dipenuhi melalui penebangan liar."

"Hasil akhirnya adalah bahwa jika tidak segera diambil tindakan, hutan akan lenyap selamanya, bersama dengan sejumlah besar keuntungan yang tersedia bagi rakyat dan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang."

Temuan tersebut mengungkapkan nasib sangat buruk bagi masa depan kesejahteraan 60 juta rakyat Indonesia yang hidupnya tergantung pada hutan ⁽¹¹⁾.

Keanekaragaman Hayati yang Terancam

Hutan Indonesia merupakan wahana bagi salah satu keanekaragaman hayati yang paling mengagumkan di dunia. Kepulauan Indonesia mencakup dua wilayah biologis yang terkenal, yaitu wilayah Asia dan Melanesia-Australia, dan memiliki spesies jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara lain.

Indonesia memiliki 17% dari spesies burung di seluruh dunia, 16% reptilia, 12% mammalia dan 10% tanaman. Namun cepatnya proses deforestasi menyebabkan daftar spesies yang terancam punah akan semakin panjang. Indonesia memiliki lebih banyak spesies yang terancam



© Dave Curry

Left: Indonesia's long list of endangered animals includes the proboscis monkey

Bekantan termasuk dalam daftar panjang satwa liar Indonesia yang terancam punah

"Permintaan kayu bulat saat ini sudah jauh melebihi suplai yang berkelanjutan"

“Thousands of orangutans are thought to have died during the forest fires”

the future viability of Indonesia's few remaining havens of biodiversity.

The plight of one of Indonesia's most charismatic animals – the orangutan – is especially urgent. Confined to just the two islands of Sumatra and Borneo, Asia's only great ape is in dramatic decline. The wild population has fallen by 50% in the last ten years, and of the remaining 15-25,000 around 80% are found in Indonesia ⁽¹⁴⁾.

While the orangutan is protected by a host of national and international laws, its numbers continue to fall. As well as the catastrophic effects of habitat loss, orangutans are still traded on the black market as pets, and attacked as crop raiders on the burgeoning oil palm plantations. Thousands of orangutans are thought to have died during the forest fires.

As the forests fall, the remaining orangutans are pressed into isolated pockets, especially the refuges provided by Indonesia's protected areas. Yet even these havens are under pressure from illegal logging, plantations and mineral extraction.

*Below:
There are only between
15-25,000 orangutans
left in the wild*

*Hanya 15-25 ribu
orangutan yang tersisa di
alam*



punah dibandingkan dengan negara lain, yaitu 128 spesies mamalia dan 104 burung ⁽¹²⁾.

Daftar mamalia yang terancam punah termasuk badak Sumatra, macan dahan, beruang madu, bekantan, harimau Sumatra, dan orang utan. Ancaman terbesar yang dialami hewan-hewan ini adalah perusakan habitat. Dari 29 spesies primata yang ditemukan di Indonesia, 20 diantaranya telah kehilangan separuh dari habitat asli mereka sejak 10 tahun yang lalu ⁽¹³⁾. Situasinya sudah pasti semakin memburuk sejak dekade yang lalu.

Di atas kertas Indonesia memiliki kawasan konservasi yang cukup luas untuk melindungi keanekaragaman hayatinya yang unik, yang mencakup 19 juta hektar atau 13% dari luas hutan yang ada ⁽¹⁵⁾. Indonesia memiliki 37 taman nasional, tetapi pada kenyataannya banyak diantaranya terancam oleh kepentingan ekonomi.

Laporan ini meninjau dampak dari penebangan kayu liar untuk tujuan komersial di dua taman nasional. Meskipun kedua taman nasional ini memiliki arti yang sangat penting dari berbagai sudut pandang, kondisinya tidak lebih baik dari kawasan lainnya. Kegiatan penebangan hutan dan penambangan telah merambah ke kawasan taman nasional sejak lama. Akan tetapi, skala kerusakannya meningkat secara dramatis dan secara serius mengancam kelangkaan keanekaragaman hayati Indonesia yang tersisa.

Kondisi salah satu hewan Indonesia yang karismatik – Orangutan – sudah sangat menguatirkan. Satu-satunya kera besar Asia ini, yang hanya terdapat di Sumatra dan Borneo (termasuk Kalimantan wilayah Indonesia, Brunei dan Sarawak), jumlahnya telah menyusut secara dramatis. Populasi liar berkurang 50% selama sepuluh tahun terakhir, dan dari 15-25.000 individu yang tersisa sekitar 80% terdapat di Indonesia ⁽¹⁴⁾.

Walaupun orangutan dilindungi oleh sejumlah hukum nasional dan internasional, jumlahnya terus menyusut. Selain diakibatkan oleh kehilangan habitat, orangutan juga masih diperdagangkan secara liar sebagai hewan peliharaan. Orang utan juga kerap dibantai oleh pengelola kelapa sawit karena dituduh sebagai hama perkebunan kelapa sawit. Selain itu, ribuan orangutan diperkirakan mati akibat kebakaran hutan.

*Left:
A catalogue of abuses led
villagers to destroy this
timber company office in
Sumatra*

*Serangkaian tindak
kesewenang-wenangan
mendorong penduduk
menghancurkan kantor
salah satu perusahaan
kayu di Sumatra*



© A. Riwandriyanto - EIA/Telapak

Towards Real Forest Reform

The core of Indonesia's forestry laws stem from a 1967 law granting the state sole control over the forests. The prevailing modus operandi since that time has been the division of forest lands into 20-year production concessions under the *Hak Pengusahaan Hutan* (HPH) system, creating appalling deforestation, removal of people's land rights, and endemic corruption.

In the current climate of political reform in Indonesia some degree of change is inevitable – but the nature and extent of forest reform is not yet clear. On one side the status quo is seeking to perpetuate its hold over forest resources, but opposing this is an increasingly vocal network of non-governmental organisations and academics calling for genuine reform.

Unreal Reform

The economic crisis in Indonesia has sparked a raft of new measures affecting the forestry sector, created at the behest of agencies such as the International Monetary Fund as loan conditions. During 1998 there were at least 20 new decrees passed spanning trade liberalisation, forest resource utilisation and transparency⁽¹⁾.

While a few of the measures have had a discernible effect, such as the break-up of the price-fixing plywood cartel APKINDO and the freezing of the much-abused reforestation fund – used to fund a national aircraft and pulpmill, most remain on paper. For example a requirement for the forestry department to conduct a comprehensive survey of the remaining forest, using satellite imagery and mapping, has not been met⁽²⁾.

Within Indonesia the battle over forestry

Menuju Reformasi Kehutanan yang Sejati

Salah satu pokok persoalan kehutanan Indonesia selama ini berpangkal dari Undang-Undang no. 5 tahun 1967 yang menjamin hak tunggal negara untuk menguasai hutan. Sejak saat itu modus operandi yang paling lazim adalah pembagian lahan hutan kedalam 20 tahun konsesi produksi yang dikenal sebagai sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sistem inilah yang menyebabkan penggundulan hutan, perampasan hak tanah adat dan korupsi yang merajalela.

Dalam era reformasi di Indonesia akhir-akhir ini sejumlah perubahan tidaklah terelakkan – akan tetapi bentuk dan jangkauan reformasi kehutanan masih belum jelas. Di satu sisi “status quo” ingin mempertahankan kekuasaannya akan sumber-sumber daya kehutanan (alam). Dilain pihak jaringan masyarakat adat, LSM dan perguruan tinggi semakin lantang menyuarakan seruan untuk reformasi yang sejati.

Reformasi Gadungan

Krisis ekonomi di Indonesia telah menyulut munculnya serangkaian kebijakan baru yang mempengaruhi sektor kehutanan, yang muncul atas permintaan badan-badan seperti IMF sebagai syarat hutang. Sepanjang tahun 1998, misalnya, setidaknya telah diterbitkan 20 peraturan baru, mulai dari liberalisasi perdagangan, pemanfaatan hasil hutan dan transparansi⁽¹⁾.

Sementara beberapa kebijakan memiliki dampak yang jelas, seperti bubarnya kartel kayu



© A. Ruwandiarto - Elit/Tempak

Above:
Logging road blocked by
community action

*Jalan logging diblokade
oleh masyarakat*

reform is focused on the government's revised draft forestry law, which is being rushed through the national parliament despite opposition from NGOs, academics and a group of former ministers. While on the surface a process of consultation was followed in the drafting of the bill, in reality input from civil society has been ignored. As the Communication Forum for Community Forestry put it, the ethos has been: Inform, Invite, Ignore⁽³⁾.

In a submission to the World Bank the forum, which includes NGOs, government and industry representatives, slammed the proposed bill on two major counts; that it perpetuates state control of the forests, and that it remains focused on the management of timber rather than the whole forest ecosystem.

The defining concept of the draft bill is the state's monopoly on forest management and resources, serving only the narrow interests of concession holders. Such an approach will never adequately tackle problems such as illegal logging, as the present government is unable to secure the forests, lacking as it does the legitimacy, capacity or political will. The draft bill once again excludes the voice of local people affected by forest exploitation, rewarding instead the timber barons and their political patrons.

It is only through a meaningful dialogue with local communities over forest management issues that the widespread problem of illegal logging can be tackled. Retaining centralised control and using the military apparatus to secure the remaining forests is doomed to failure.

lapis APKINDO dan pembekuan dana reboisasi yang banyak disalahgunakan, sebagian besar kebijakan hanyalah macan kertas belaka. Misalnya, persyaratan bagi departemen kehutanan untuk melakukan survai komprehensif di kawasan hutan yang tersisa, dengan menggunakan citra satelit dan pemetaan, belum pernah dilaksanakan⁽²⁾.

Di Indonesia perjuangan untuk reformasi kehutanan diarahkan pada revisi rancangan undang-undang pokok kehutanan, yang oleh pemerintah Habibie terburu-buru dibawa ke DPR tanpa menghiraukan tentangan dari masyarakat adat, LSM, kalangan perguruan tinggi dan sekelompok mantan menteri. Di permukaan seolah-olah telah terjadi proses konsultasi selama penyusunan konsep undang-undang tersebut. Kenyataannya masukan dari masyarakat madani pada akhirnya selalu diabaikan. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menyebutnya sebagai etos: Beritahu, Undang dan Abaikan⁽³⁾.

Dalam petisinya kepada Bank Dunia, forum yang terdiri dari LSM, perwakilan badan pemerintah dan industri, menolak usulan undang-undang tersebut dengan dua alasan utama: undang-undang tersebut melanggengkan kekuasaan negara atas hutan, dan tetap berfokus pada perdagangan kayu daripada pengelolaan keseluruhan ekosistem hutan.

Rancangan Undang Undang Pokok Kehutanan pada hakekatnya menegaskan monopoli negara akan pengelolaan hutan dan sumber dayanya. Pendekatan seperti ini tidak akan pernah dapat mengatasi masalah dengan tepat seperti penebangan liar, karena pemerintah tidak mampu melindungi hutan, tidak memiliki kewenangan, kapasitas atau kemauan politis. Rancangan undang-undang akan kembali menyingkirkan sebagian besar masyarakat setempat dari sumber daya hutan, dan sebaliknya justru memberi peluang kepada raja kayu dan para pelindung politik mereka.

Hanya dengan peran sentral masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, masalah penebangan liar yang merajalela dapat diatasi. Mempertahankan kontrol yang terpusat dan menggunakan aparat militer untuk mempertahankan hutan yang tersisa sudah dapat dipastikan akan mengalami kegagalan.

Reformasi Sejati

Banyak pihak menyerukan sikap menentang Rancangan Undang Undang tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahkan mendukung penghapusan sama sekali rancangan

Real Reform

Many voices have spoken out against the government's bill. The Indonesian Forum for the Environment (WALHI) advocates the scrapping of the bill in favour of an over-arching Natural Resources Law, regulating oil and mineral extraction as well as forest exploitation ⁽⁴⁾.

The Communication Forum for Community Forestry has drafted an alternative forest resources law, aimed at returning sovereignty over forestry resources to the people, and based on public accountability. The alternative bill states that all sectors of society have the right to a role in forest resource management, and in monitoring forest utilization. Furthermore consent will be sought from all affected parties if forest use in an area is to be changed ⁽⁵⁾.

As it is based on the recognition of people's rights, the alternative bill has the potential to counter illegal logging. Land disputes will be settled through local negotiations between community leaders and government officials, while local people will have a clear motivation as stakeholders in forest use rather than being excluded by huge concession owners.

Although legislators in the parliament are attempting to force the official draft bill through before a newly-elected government comes into power in November 1999, there is growing dissent from factions inside and outside the parliament seeking to ensure the law is not passed in its current form ⁽⁶⁾.

In addition to the alternative bill, a number of other initiatives are emerging in the quest for true forest reform. One of these is the national Consultative Forestry Council, which will bring together a number of interests to represent civil society and provide an alternative voice to the government in the field of forest policy.

The Council is in the process of being established, and its basic tasks have been agreed; to monitor and counter cases where forest utilization is contrary to the public interest and contravenes communities' rights, to lobby the government over forest policies that threaten the public interest, and to resolve disputes over the ownership of forest resources.

The role of the Council will be to act as a watchdog for the forest sector, highlighting illegal activities and corruption, and resolving disputes. The organisation will be devolved through a system of national, regional and local councils, so that individual cases can be decided by the communities and groups most affected.

Another initiative revolves around forest

undang-undang tersebut, dan sebagai gantinya mengusulkan Undang Undang Sumber Daya Alam, yang mengatur seluruh pengelolaan sumber daya alam, termasuk penambangan minyak dan mineral serta pendayagunaan hutan ⁽⁴⁾.

FKKM telah mengajukan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai RUU alternatif yang bertujuan untuk mengembalikan kewenangan sumber daya alam kepada masyarakat, dan bertanggungjawab publik. Rancangan undang-undang alternatif ini menyatakan bahwa semua sektor masyarakat berhak untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam/hutan dan dalam pemantauan pemanfaatannya. Lebih jauh lagi, jika akan dilakukan perubahan penggunaan hutan di suatu daerah, maka diperlukan persetujuan dari semua pihak ⁽⁵⁾.

Karena didasarkan atas pengakuan terhadap hak-hak rakyat, undang-undang alternatif ini berpotensi untuk mengatasi penebangan liar. Sengketa tanah akan diselesaikan melalui perundingan setempat antara pemimpin masyarakat dan pejabat pemerintah. Masyarakat akan memiliki andil dalam hutan dan tidak disingkirkan oleh pemilik konsesi raksasa.

Walaupun sebagian anggota DPR berusaha menelurkan Rancangan Undang-undang yang resmi sebelum pemerintahan yang terbentuk pada bulan November 1999, di lain pihak ketidaksepakatan semakin berkembang dan banyak pihak menginginkan undang-undang tersebut tidak disepakati dalam bentuknya yang ada sekarang ⁽⁶⁾.

Selain inisiatif berupa Rancangan Undang Undang alternatif tersebut, sejumlah alternatif lain muncul menanggapi permintaan akan reformasi kehutanan yang sejati. Salah satunya adalah Dewan Musyawarah Kehutanan yang akan memadukan berbagai kepentingan untuk

*Below:
Illegal log raft in
Tanjung Puting
National Park*

*Rakit kayu para
penebang liar di Taman
Nasional Tanjung
Puting*



© Dave Curry - EIA/Impact

“in the current political vacuum the situation is worsening”

Right: *Illegal logging such as this in Gunung Leuser NP is symptomatic of a deeper malaise in Indonesia's forests*

Penebangan liar seperti di T.N. Gunung Leuser ini menggejala di hutan Indonesia yang semakin meranggas



© A. Ruzidjanto - EIA/Tidapak

certification. Currently in Indonesia the certification of sustainable production forest management is run by Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), an independent and well-respected institute. The extension of LEI's work will help ensure the compliance of the timber industry to a number of ecological and social criteria, and to expose illegal timber.

A third development has been the expansion of Forest Watch Indonesia, set up in 1997 by Telepak as a network of NGOs to track logging, plantation

mewakili masyarakat madani dan memberikan suara alternatif kepada pemerintah dalam kebijakan kehutanan.

Tujuan membentuk DMK dinyatakan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1999 dan tugas-tugas dasarnya telah disepakati, yaitu memantau dan menentang penyalahgunaan hutan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan melanggar hak-hak masyarakat, mencegah kebijakan pemerintah yang mengancam kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sum-

development, mining and other industrial activities within and around Indonesia's remaining natural forests.

One of FWI's core tasks is to gather and analyse data relevant to the country's forests and to make it available to interested parties. To date the project has collected baseline data on the status of Indonesia's forests, existing and planned development projects such as plantations and mines, and documented success stories of well-managed concessions and community-led forest management systems ⁽⁷⁾.

FWI's strength lies in its structure as a network of local groups actively monitoring forest concession holders across the country for infractions, and filtering the information up to the national level. It is also building the capacity of local groups to monitor and investigate forestry abuses.

If these real reforms proceed and grow, the long-term future for Indonesia's remaining forests will be brighter. Yet in the current political vacuum the situation is worsening. The international community must ensure that the current government of Indonesia takes immediate action against concession holders that break the law and the timber barons profiting from illegal logging.



© Dave Currey - ELA/Tetapak

ber daya alam, dan menyelesaikan berbagai konflik kepemilikan sumber daya alam.

DMK akan berperan sebagai pengawas sektor kehutanan, mengungkapkan kegiatan ilegal dan korupsi, dan menyelesaikan sengketa. Organisasi ini akan berfungsi melalui sistem nasional, regional dan lokal, sehingga setiap kasus dapat diputuskan oleh masyarakat dan kelompok yang paling terkait.

Inisiatif lainnya berkisar seputar Sertifikasi Hutan. Sampai saat ini di Indonesia sertifikasi pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan diselenggarakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), sebuah lembaga non pemerintah yang mandiri dan berwibawa. Perluasan tugas LEI akan membantu memastikan kepatuhan industri perkayuan terhadap sejumlah kriteria ekologis dan sosial.

Perkembangan ketiga adalah inisiatif untuk membangun Forest Watch Indonesia, yang dimulai pada tahun 1997 oleh sekelompok LSM. Forest Watch Indonesia dimaksudkan untuk memantau perusahaan hutan, perkembangan perkebunan, pertambangan dan kegiatan industri lainnya di dalam dan di sekitar hutan Indonesia.

Salah satu tugas utama FWI adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan hutan Indonesia dan menyediakannya kepada mereka yang berkepentingan. FWI berusaha mengumpulkan data dasar tentang status hutan Indonesia, proyek pembangunan yang sedang berlangsung dan direncanakan seperti perkebunan dan pertambangan, dan mendokumentasikan kisah-kisah keberhasilan konsesi yang dikelola dengan baik dan sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat ⁽⁷⁾.

Kekuatan FWI terletak pada strukturnya sebagai jaringan kelompok lokal yang secara aktif memantau pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang konsesi hutan di seluruh Indonesia, dan menyaring informasi hingga ke tingkat nasional. FWI juga membangun kapasitas kelompok lokal untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran di sektor kehutanan.

Jika reformasi sejati ini berlanjut dan berkembang, masa depan hutan Indonesia yang tersisa akan lebih cerah. Namun dalam masa kekosongan kekuasaan saat ini situasi memburuk dan pemerintahan yang ada tidak boleh dibiarkan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menghentikan kegiatan para pemegang konsesi yang melanggar hukum dan para raja kayu yang memetik keuntungan dari penebangan liar.

*Left:
Real reform is needed to
protect Indonesia's
remaining forests*

*Reformasi sejati
diperlukan untuk
melindungi hutan-hutan
Indonesia yang tersisa*

“Nine of the 13 primate species of Borneo are found in the park”

Tanjung Puting National Park

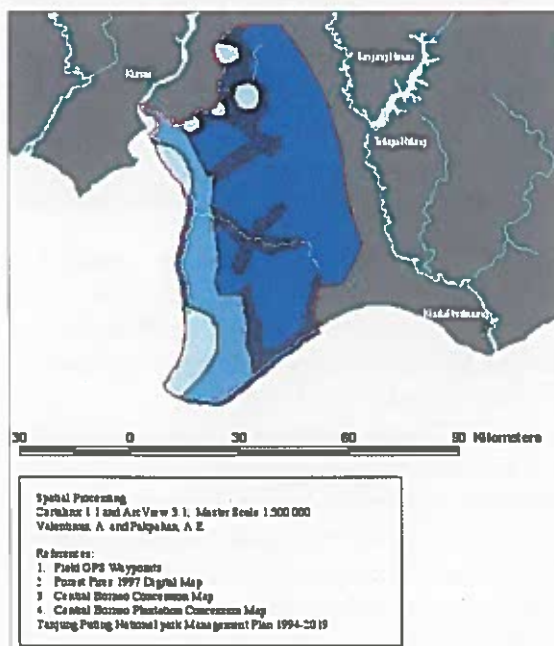
The Jewel of Central Kalimantan

Tanjung Puting National Park is a conservation area of global importance, providing an island of biodiversity amid the rapidly diminishing forests of Borneo. It is recognised as a world Biosphere Reserve by the United Nations ⁽¹⁾ and forms the largest protected area of swamp forest in the region of South-East Asia ⁽²⁾. It was awarded National Park status in 1984 after being classified as a wildlife reserve since the 1930s.

The park is located in the province of Central Kalimantan, and occupies an alluvial peninsula jutting out into the Java Sea. Covering an area of over 400,000 hectares, Tanjung Puting embraces a variety of different ecosystems, including tropical heath forest, peat swamp forest and mangrove forest.

Despite much of the park being permanently waterlogged it contains a number of commercial tree species including meranti (*Shorea spp.*) and ramin (*Gonystylus spp.*). It is home to a dazzling array of wildlife, including over 200 bird species, 17 reptile species and 29 mammal species, many of which are endangered including the estuarine crocodile, clouded leopard, Malayan sunbear and Storm's stork ⁽³⁾.

Nine of the 13 primate species of Borneo are found in the park, such as the distinctive proboscis monkey, the agile gibbon, silvery leaf-eating monkey, and Tanjung Puting's most famous inhabitant – the orangutan.



Right:
Map of Tanjung Puting National Park

Peta Taman Nasional Tanjung Puting

Far Right:
Tanjung Puting's orangutans attract tourists from around the world

Orangutan di Tanjung Puting menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia

Taman Nasional Tanjung Puting

Mutiara Kalimantan Tengah

Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi yang memiliki arti penting secara global, dengan keanekaragaman hayati yang kaya ditengah-tengah pesatnya kepunahan hutan Borneo. Tanjung Puting telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer (*Biosphere Reserve*) oleh PBB ⁽¹⁾ dan di sana terdapat kawasan lindung hutan rawa yang terluas di Asia Tenggara ⁽²⁾. Kawasan ini memperoleh status Taman Nasional pada tahun 1984 setelah sejak tahun 1930an digolongkan sebagai suaka margasatwa.

Taman nasional ini terletak di propinsi Kalimantan Tengah, di semenanjung *alluvial* yang menjorok ke Laut Jawa. Dengan luas 300.000 hektar, Tanjung Puting mencakup berbagai ekosistem yang berbeda, antara lain kerangas tropis, hutan rawa gambut dan hutan mangrove.

Walaupun sebagian besar kawasan terus-menerus terendam air di sana banyak terdapat jenis pohon komersial seperti meranti (*Shorea spp.*) dan ramin (*Gonystylus spp.*). Kawasan ini merupakan wahana bagi satwa dan flora liar, termasuk di antaranya 200 spesies burung, 17 spesies reptil dan 19 spesies mammalia. Kebanyakan diantaranya adalah spesies-spesies yang terancam kepunahan seperti buaya muara, macan dahan, beruang madu dan bangau ⁽³⁾.

Sembilan dari 13 spesies primata Borneo terdapat di taman nasional ini, seperti bekantan yang terkenal, owa yang lincah, kera putih pemakan daun, dan penghuni Tanjung Puting yang paling terkenal – orangutan.



© Dave Curry



© Dave Curry

A Refuge for the Orangutan

Tanjung Puting is known around the world as the site of the longest-running scientific research project into wild orangutan behaviour. In the early 1970s a young Canadian scientist, Birute Galdikas, travelled to the swamp forests of the region to begin an intensive observation programme which continues today.

Galdikas was one of three female researchers recruited by Louis Leakey to probe the link between the behaviour of the great apes and humans. While Diane Fossey went to Rwanda to study gorillas and Jane Goodall travelled to Tanzania to look at chimpanzees, Galdikas chose Tanjung Puting to study the mysterious orangutan – Asia's only great ape. She established an extensive research area centred on Camp Leakey, named after her mentor.

In the intervening years Camp Leakey and the ranger posts at Pondok Tanggui and Tanjung Harapan have been used to rehabilitate captive orangutans with the goal of releasing them back into the wild. These centres, along with the proboscis monkey research camp at Natai Lengkuas, provide the main tourist attractions in the park.

Today Tanjung Puting is home to around 2,000 orangutans and provides the sole protected area of orangutan habitat in Central Kalimantan.⁽⁴⁾

Surga bagi Orangutan

Tanjung Puting dikenal sebagai lokasi penelitian ilmiah tentang perilaku orangutan yang sudah berlangsung paling lama di dunia. Pada awal tahun 1970an seorang ilmuwan muda dari Kanada, Birute Galdikas, pergi ke kawasan hutan rawa ini dan memulai penelitiannya yang intensif, yang masih berlangsung hingga sekarang.

Galdikas merupakan salah seorang dari tiga ilmuwan perempuan yang dipilih oleh Louis Leakey untuk meneliti hubungan antara perilaku kera besar dan manusia. Diane Fossey pergi ke Rwanda untuk mempelajari gorila, Jane Goodall pergi ke Tanzania untuk meneliti chimpanzee, dan Galdikas memilih Tanjung Puting untuk mempelajari rahasia orangutan, satu-satunya kera besar Asia. Ia membangun pusat penelitian di Camp Leakey, sesuai dengan nama mentornya.

Sejak saat itu banyak orangutan peliharaan orang yang kemudian direhabilitasi di Camp Leakey dan pondok-pondok pengawas di Pondok Tangui dan Tanjung Harapan sebelum kemudian dikembalikan ke alam bebas. Pusat-pusat rehabilitasi tersebut, juga pangkalan penelitian bekantan di Natai Lengkuas, menjadi daya tarik utama wisatawan di taman nasional ini. Dewasa ini Tanjung Puting menjadi kediaman bagi 2.000 orangutan dan merupakan satu-satunya kawasan yang dilindungi bagi habitat orangutan di Kalimantan Tengah⁽⁴⁾.

*Above:
Tanjung Puting is
central Kalimantan's
only protected area for
orangutans*

*Tanjung Puting
merupakan satu-satunya
kawasan lindung bagi
orangutan di
Kalimantan Tengah*

“If the current rate of logging continues the park will be gone in five years”

Under Siege

Tanjung Puting National Park is being attacked on an unprecedented scale. Hemmed in by rapidly-expanding oil palm plantations, its waters poisoned by mercury used in gold mining, damaged by forest fires, the future viability of this protected oasis is severely threatened.

The gravest danger is posed by illegal logging. While the more remote regions of the park have long been affected by small-scale logging ⁽⁵⁾ over the last year the level and extent of the logging have grown dramatically. Tanjung Puting is now facing an onslaught orchestrated by local timber barons, determined to strip the park of its remaining commercial timber.

The logging has spread like a contagion from the south and east into the core of the park, and is now even rampant along the Sekonyer River, where the research stations and tourist lodges are found. The head of Tanjung Puting National Park, Suherti Redy, believes that if the current rate of logging continues the park will be gone in five years ⁽⁶⁾.

The logging is carried out in full view of the local authorities and is flourishing in an atmosphere of endemic corruption among the park rangers, police and military. The main culprits behind the massive timber theft are a group of sawmill owners in the nearby port of Kumai, principally Kartono and Halim, and local timber tycoon Abdul Rasyid.

Terkurung

Saat ini terdapat ancaman yang luar biasa terhadap Taman Nasional Tanjung Puting. Dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit yang terus merambah mendekati kawasan, sungai-sungainya teracuni oleh merkuri yang digunakan dalam penambangan emas, dan rusak oleh kebakaran hutan, menjadikan masa depan oasis yang dilindungi ini sangat terancam.

Ancaman yang paling besar adalah penebangan liar. Bukan rahasia lagi bahwa bagian kawasan yang lebih terpencil telah lama menjadi sasaran penebangan hutan dalam skala kecil-kecilan ⁽⁵⁾. Namun, sejak tahun lalu intensitas dan luasnya penebangan meningkat secara dramatis. Saat ini Tanjung Puting menghadapi serangan yang mengerikan yang didalangi oleh para raja kayu lokal. Mereka berniat menelanjangi taman nasional untuk memperoleh kayu komersial yang tersisa.

Penebangan hutan menyebar seperti penyakit menular dari selatan dan timur menuju ke arah pusat taman nasional. Bahkan kini sudah merambah sepanjang Sungai Sekonyer, dimana stasiun penelitian dan pondok-pondok wisata berada. Kepala Taman Nasional Tanjung Puting, Suherti Redy, percaya bahwa jika tingkat penebangan hutan terus berlangsung seperti sekarang taman nasional akan punah dalam waktu lima tahun ⁽⁶⁾.

Penebangan hutan berlangsung di depan mata petugas setempat dan semakin meruyak ditengah iklim korup yang meliputi para pengawas hutan, polisi dan aparat militer. Biang utama dibalik pencurian kayu besar-besaran ini adalah kelompok pemilik sawmill di bandar Kumai, Kartono dan Halim, dan raja kayu setempat Abdul Rasyid.

Right:
Oil Palm plantations surround the park

Perkebunan kelapa sawit di sekitar Taman Nasional



© Dave Curry - EIA/Tidakak

From Illegal Logger to Timber Boss

Abdul Rasyid started out as an illegal logger in the southern part of Tanjung Puting, and now through his company Tanjung Lingga owns sawmills, plywood and mouldings factories, palm oil plantations, barges, tugboats, and cargo ships. His story has come full circle, as he is now the main beneficiary of the looting of the park.

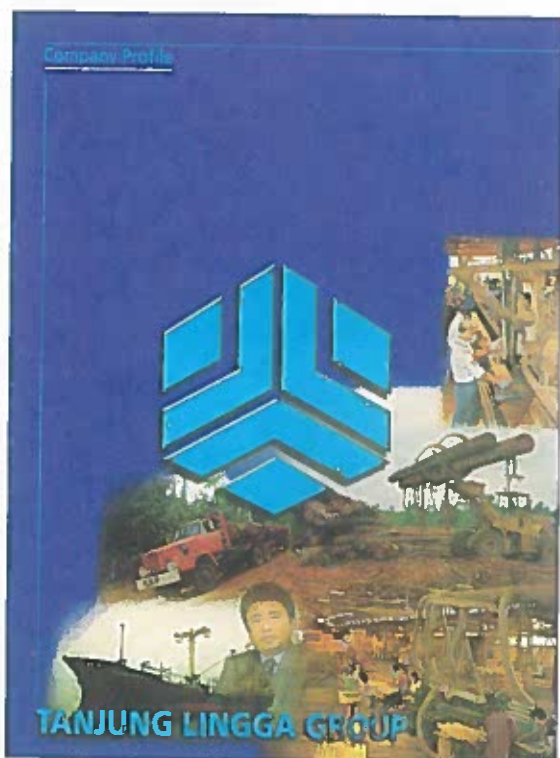
Over the years Rasyid has built up a powerful business empire in his home town of Pangkalanbun and has developed strong connections and influence with both the local authorities and provincial authorities in Palangkaraya, the capital of Central Kalimantan. These include close links with the police and military.

He is well known locally for his wealth and lavish lifestyle, and stories abound about how he owns the largest house in town and chartered an aeroplane to bring famous musicians from Jakarta to his daughter's wedding.

Rasyid's Tanjung Lingga Group is a family affair, with his second wife Nurriyah and nephew Sugianto sitting on the board of directors. The company has offices in Pangkalanbun, Jakarta and Singapore ⁽⁷⁾.

Tanjung Lingga's glossy brochure details seven separate trading entities, six of which do not appear in company registers held in Jakarta. The records for the seventh division, PT Rimbayu Barito, do not mention either Tanjung Lingga or Rasyid ⁽⁸⁾.

The brochure also lists six separate forest concessions under Tanjung Lingga's banner. Again,



Dari Penebang Liar menjadi Bos Kayu

Abdul Rasyid memulai 'karier'nya sebagai penebang liar di kawasan sebelah selatan Taman Nasional Tanjung Puting. Kini ia mempunyai perusahaan sendiri: Tanjung Lingga.

Perusahaannya itu sudah memiliki beberapa *sawmill*, pabrik kayu lapis dan *moulding*, perkebunan kelapa sawit, tongkang, kapal tunda, dan kapal kargo. Kisah hidupnya telah cukup panjang, dari seorang penebang liar kini ia telah menjadi pelaku utama pencurian di taman nasional.

Selama bertahun-tahun Rasyid membangun kerajaan bisnisnya di kampung halaman Pangkalanbun dan membangun hubungan dan pengaruh yang kuat dengan aparat pemerintah lokal dan propinsi di Palangkaraya, ibukota Kalimantan Tengah. Koneksi ini termasuk hubungan dekat dengan polisi dan aparat militer.

Di tingkat lokal ia sangat dikenal dengan kekayaan dan gaya hidup mewahnya. Cerita seputar dirinya berkisar tentang rumah-rumahnya yang terbesar di kota. Untuk memeriahkan pesta pernikahan anak gadisnya ia mampu menyewa pesawat terbang untuk mendatangkan penyanyi terkenal dari Jakarta.

Perusahaan Rasyid, Tanjung Lingga Group, merupakan bisnis keluarga. Istri keduanya Nurriyah dan keponakannya Sugianto duduk di jajaran direksi. Kantor perusahaan itu tersebar di Pangkalanbun, Jakarta dan Singapura ⁽⁹⁾.

Brosur Tanjung Lingga yang mewah menggambarkan secara rinci tujuh kegiatan bisnis mereka. Enam diantaranya tidak tercantum dalam daftar perusahaan di Jakarta. Dalam keterangan tentang divisi ketujuh, PT Rimbayu Barito, tidak tercantum nama Tanjung Lingga maupun Rasyid ⁽¹⁰⁾.

Brosur tersebut juga mencantumkan enam konsesi hutan dibawah bendera Tanjung Lingga. Lagi-lagi, hanya satu diantaranya menggambarkan peta konsesi resmi yaitu Rimbayu Barito, tetapi kepemilikan dari lahan itu telah diambil alih oleh perusahaan milik negara, Inhutani ⁽¹¹⁾. Kemungkinan Rasyid beroperasi dengan menjadi sub-kontraktor bagi Inhutani, suatu praktek yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang nasional kehutanan.

Para investigator dari EIA/Telapak, yang berpura-pura menjadi pembeli kayu, mendapat kesempatan untuk mengamati lebih dekat praktek bisnis Rasyid melalui dua pertemuan dengan keponakannya Sugianto. Pada pertemuan pertama yang singkat di markas Tanjung Lingga di Pangkalanbun, Sugianto mengatakan bahwa



Above:
Abdul Rasyid started out as an illegal logger in the park

Abdul Rasyid memulai 'karier'nya sebagai penebang liar di Taman Nasional

Left:
Tanjung Lingga's activities include timber plantation and shipping

Aktivitas Tanjung Lingga meliputi juga perkebunan dan pelayaran



© Dave Curry - EIA/Telapak



© Dave Curry - EIA/Telapak



© Dave Curry - EIA/Telapak

Above Left:
One of Rasyid's factories, making ramin mouldings for export

Salah satu pabrik moulding ramin untuk ekspor milik Rasyid

Above Middle:
Unmarked ramin logs outside Rasyid's factory

Kayu ramin tanpa label di pabrik milik Rasyid

Above Right:
Ramin logs being sawn at Rasyid's expanding plant

Kayu ramin sedang diolah di pabrik milik Rasyid yang semakin berkembang

the only one of these to feature on official concession maps is Rimbayu Barito, but ownership of this land has been passed to the state forestry company Inhutani⁽⁹⁾. It is likely that Rasyid operates by sub-contracting concessions from Inhutani, in contravention of national forestry laws.

EIA/Telapak investigators posing as timber buyers gained an insight into Rasyid's business practices during two meetings with his nephew Sugianto. During a brief initial meeting at Tanjung Lingga's headquarters in Pangkalanbun, Sugianto said his company could offer both legal and illegal business, and recommended the second category as a way of avoiding a 30% export tax.

The following day the undercover team were invited on a tour of one of Tanjung Lingga's ramin factories, accompanied by Sugianto. After a journey by motor launch south out of Pangkalanbun along the Arut River, the huge factory was reached. The operation was divided into three separate hangars – a sawmill, storage area and a mouldings plant – providing an integrated ramin processing facility.

During the tour vast amounts of ramin were observed, and construction work was expanding capacity by adding new drying rooms. In the sawmill area a small klotok boat was seen delivering unmarked ramin logs, showing that the wood had not come from a legal concession.

At a meeting held after the tour Sugianto soon returned to the theme of illegal business. He advised the potential buyers to cover up any illegal trade with Tanjung Lingga by carrying out a small amount of legal business to provide the necessary paperwork. Sugianto said he found illegal export of timber to Malaysia, Hong Kong, Singapore and Taiwan easy as customs could be influenced, but warned that China was far more difficult. He also spoke of his plans to export ramin blinds to the USA at a price of \$1,200 per cubic metre.

On the boat journey back to town, Sugianto boasted of Rasyid's connections to the local mili-

perusahaannya dapat menawarkan bisnis legal dan ilegal, dan menyarankan pilihan yang kedua sebagai jalan untuk menghindari pajak ekspor sebesar paling tidak 25 persen.

Hari berikutnya, tim penyamaran ini diundang untuk melihat-lihat salah satu pabrik ramin milik Tanjung Lingga, diantar oleh Sugianto sendiri. Perjalanan dengan motor ke arah selatan Pangkalanbun sepanjang Sungai Arut membawa tim ke sebuah pabrik yang besar. Kegiatan dibagi dalam tiga bagian yang terpisah, yaitu *sawmill*, bagian penyimpanan dan pabrik *moulding*, yang membentuk fasilitas pemrosesan ramin yang terpadu.

Selama kunjungan tersebut, tim menyaksikan ramin dalam jumlah yang banyak sekali. Bahkan mereka sedang membangun sejumlah ruang pengering baru untuk menambah kapasitasnya. Di bagian *sawmill* tampak sebuah perahu *klotok* kecil yang sedang mengantarkan kayu ramin, tanpa label menandakan bahwa kayu tersebut bukan berasal dari konsesi legal.

Pada suatu pertemuan setelah kunjungan ke pabrik, Sugianto langsung mengarahkan pembicaraan kepada topik bisnis ilegal. Ia menyarankan calon pembeli untuk menutupi bisnis ilegalnya dengan Tanjung Lingga dengan cara membuat sejumlah kecil transaksi legal untuk mendapatkan beberapa dokumen yang diperlukan. Sugianto menyatakan ekspor kayu curian ke Malaysia, Hong Kong, Singapura dan Taiwan mudah dilakukan karena petugas bea cukai di negara-negara tersebut relatif mudah dipengaruhi. Tetapi ia memperingatkan bahwa Cina jauh lebih sulit. Ia juga berbicara tentang rencananya untuk meng-ekspor tirai ramin ke Amerika Serikat seharga \$1.200 per meter kubik.

Dalam perjalanan kembali ke kota, Sugianto menyombongkan koneksi Rasyid dengan pejabat militer lokal dan mengatakan bahwa pamannya memulai kariernya sebagai penebang liar di Tanjung Puting.

Tim EIA/Telapak yang lainnya mendapat peluang untuk melihat operasi ramin dari

tary and told how his uncle had begun his career as an illegal logger in Tanjung Puting.

A second EIA/Telapak team gained access to another of Rasyid's ramin operations, further north on the Arut River. The team observed that the factory, called Fajar Harapan, was stacked high with ramin, before being escorted off the site by armed security guards. Behind the factory was a barracks housing the factory's workers, who were on a 40-day contract to process the ramin at a fee of Rp 8,000 (\$1.3) per day.

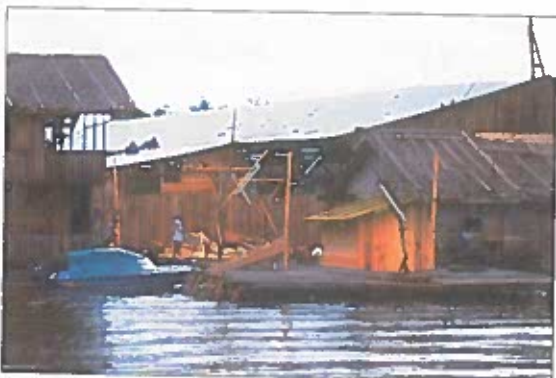
Local people said Rasyid owns four ramin factories along the Arut River, yet only one of Tanjung Lingga's business divisions appears on a list of all the sawmills and wood factories licensed to operate in Central Kalimantan ⁽¹⁰⁾. As ramin has virtually been logged out in the area and is only found in substantial amounts within Tanjung Puting ⁽¹¹⁾, the source of the logs feeding Rasyid's expanding ramin business is clear.

The legal veneer covering the illegal logging, which Sugianto advocated, is easily obtainable for a man of Rasyid's local influence. He simply buys the stolen ramin which the authorities occasionally seize. On 7th June 1999 a steel barge was seized by the authorities in Kumai Bay ⁽¹²⁾. On board the "Sinar Pawan II" were almost 1,500 illegal ramin logs, equivalent to 864 cubic metres of wood and worth \$500,000 on the international market. The consignment was auctioned by the police on 23rd June, and one of the two buyers was the company PT Sinarut Wiryra Perkasa – owned by Rasyid.

The Kumai Connection

While Rasyid's empire along the Arut River grows, timber dealers and sawmill owners in the port of Kumai are also getting rich from the pillage of Tanjung Puting. The waters of Kumai Bay are busy with small boats towing log rafts, steel barges and tugboats, all involved in moving timber stripped from the park onto the international market, and in full view of the authorities.

Two of the largest processing operations in



© Dave Curry – EIA/Telapak

perusahaan Rasyid, di hulu utara Sungai Arut. Tim mengamati bahwa pabrik, yang bernama Fajar Harapan, penuh dengan tumpukan ramin, sebelum dibawa keluar lokasi dengan kawalan petugas keamanan bersenjata.

Di belakang pabrik terdapat barak perumahan pekerja pabrik. Mereka mendapat kontrak 40 hari untuk memproses ramin dengan upah Rp.8.000,- (\$1.30) per hari.

Masyarakat setempat mengatakan bahwa Rasyid memiliki empat pabrik ramin sepanjang Sungai Arut, namun hanya satu milik divisi bisnis Tanjung Lingga yang tercantum dalam daftar seluruh *sawmill* dan pabrik kayu yang terdaftar beroperasi di Kalimantan Tengah ⁽¹⁰⁾. Karena ramin sebenarnya sudah terkuras habis dari kawasan tersebut dan hanya terdapat dalam jumlah terbatas di dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting ⁽¹¹⁾, maka jelaslah dari mana asalnya sumber kayu yang memasok bisnis ramin Rasyid yang semakin berkembang itu.

Dokumen resmi untuk menyelubungi praktek pencurian kayu yang didukung oleh Sugianto sangat mudah didapat oleh seorang yang berpengaruh seperti Rasyid. Ia cukup membeli ramin curian yang hanya sewaktu-waktu saja disita oleh petugas. Pada tanggal 7 Juni 1999, sebuah tongkang disita oleh petugas di Teluk Kumai ⁽¹²⁾. Di dalam tongkang "Sinar Pawan II" itu ditemukan sedikitnya 1.500 kayu ramin curian, setara dengan 864 meter kubik kayu dan bernilai 500.000 dolar di pasar internasional. Hasil tangkapan itu dilelang oleh polisi pada tanggal 23 Juni dan salah satu dari dua pembelinya adalah perusahaan PT Sinarut Wiryra Perkasa – milik Rasyid.

Jalur Kumai

Sementara kerajaan Rasyid di sepanjang Sungai Arut berkembang, pedagang perantara dan pemilik *sawmill* di bandar Kumai juga menjadi semakin kaya dari kerusakan Tanjung Puting. Perairan Teluk Kumai sibuk dengan perahu-perahu klotok menarik rakit kayu, tongkang baja dan kapal tunda. Semuanya terlibat dalam kegiatan mengurus kayu dari taman nasional untuk dikirim ke pasar internasional. Kegiatan



© Dave Curry – EIA/Telapak

Far Left:
Kartono's illegal sawmill
south of Kumai

*Sawmill liar milik
Kartono di selatan Kumai*

Left:
Illegal logs lined up
outside Kartono's sawmill

*Kayu curian antri di
luar sawmill milik
Kartono*

Right:

The barge *Sapphire 7* loading illegal ramin

Tongkang Sapphire 7 sedang memuat ramin curian

Far Right:
The barges operate in full view of the authorities

Tongkang-tongkang beroperasi di terang-terangan di depan mata para petugas

© Dave Curry - EIA/Telapak



Kumai receiving the illegal logs are sawmills owned by Kartono and Halim – timber dealers from Pontianak in West Kalimantan. Kartono, who uses the company name CV Kapitan Jaya, runs a sawmill south of Kumai. EIA/Telapak investigators witnessed a huge amount of ramin logs tied up outside this factory, and traced several boats emerging from the park pulling logs to be added to the pile. On one occasion the log rafts stretched for over one kilometre, and were all unmarked.

Local people spoke of the sawmill being lit up all night as it worked around the clock to process the illicit timber. Not only does Kartono take illegal logs, his whole sawmill is illegal. Official records reveal that this sawmill has never been granted licence by the authorities ⁽¹³⁾.

A second sawmill profiting from the destruction of Tanjung Puting is located on the waterfront in the north of Kumai. This operation is run by Halim, whose company is called UD Muslim Halim, one of the two buyers of the illegal ramin seized from the Sinar Pawan II barge. While Halim does have a licence to process wood, he also takes a cut of the illegal ramin from the park.

Much of the timber processed in these plants is moved through a sophisticated network of dealers and onto the international market. Pontianak and the port of Kuching in Malaysian Borneo are key points in this network.

EIA/Telapak investigators boarded a ship called Hasil Prima, docked in Kumai, which was loading ramin and other wood. The captain said he was taking the illegal timber to Kuching, in Malaysian Borneo, adding that the cargo would be transferred onto another ship for the final part of the journey to avoid problems with the Malaysian authorities. He also spoke of a Pontianak businessman who organised the delivery and had the necessary contacts to launder the timber on the international market, including Europe. Two further boats loading ramin were also bound for Kuching according to the crew, where the ramin would fetch up to Rp 2 million (\$300) per cubic metre.

The sheer scale and commercial nature of the



© Dave Curry - EIA/Telapak

ini semua berlangsung di depan mata petugas.

Dua dari pemroses kayu terbesar di Kumai dan penadah kayu curian adalah *sawmill* milik Kartono dan Halim – keduanya pedagang perantara kayu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kartono, yang menggunakan nama perusahaan CV Kapitan Jaya, mengoperasikan *sawmill* di selatan Kumai. Investigator EIA/Telapak menyaksikan sejumlah besar kayu ramin terikat di luar pabrik. Sejumlah kapal juga kedatangan keluar dari kawasan taman nasional sambil menarik kayu untuk ditambahkan ke tumpukan kayu tersebut. Dalam satu kesempatan rakit kayu tersebut membentang sepanjang lebih dari satu kilometer, dan semuanya tidak berlabel.

Masyarakat setempat menceritakan tentang *sawmill* yang terus bekerja sepanjang malam, seolah-olah mengolah kayu curian tersebut tidak ada habis-habisnya. Tidak hanya sumber kayunya yang ilegal, seluruh *sawmill* milik Kartono juga liar. Catatan resmi mengungkapkan bahwa *sawmill* tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang ⁽¹³⁾.

Sawmill kedua yang mengeruk keuntungan dari perusakan Tanjung Puting berlokasi di pantai utara Kumai. Yang ini milik Halim, perusahaannya bernama UD Muslim Halim. Perusahaan ini adalah salah satu pembeli kayu ramin curian yang disita dari tongkang Sinar Pawan II. Halim memiliki ijin untuk mengolah kayu, tetapi ia juga memanfaatkan kayu curian dari taman nasional.

Kebanyakan kayu yang diproses di pabrik tersebut dibawa melalui suatu jaringan pedagang perantara yang canggih ke pasar internasional. Pontianak dan pelabuhan Kuching di Borneo wilayah Malaysia merupakan titik kunci dari jaringan ini.

Investigator EIA/Telapak juga berkesempatan menumpang sebuah kapal bernama Hasil Prima, yang bersandar di Kumai, dan sedang memuat ramin dan kayu lainnya. Sang kapten mengatakan ia membawa kayu curian tersebut ke Kuching di Borneo Malaysia. Ia menambahkan bahwa angkutan tersebut akan dipindahkan ke kapal lain pada bagian perjalanan terakhir untuk

logging taking place in Tanjung Puting is vividly illustrated by the presence of steel barges in Kumai Bay, loading up the ramin brought out of park in small rafts.

EIA/Telapak saw two barges on a single day in May 1999, anchored near the mouth of the Sekonyer River. One of the barges, "Sapphire 7", was the centre of intense activity as a crane scooped up ramin logs floating around the barge. A stream of *klotok* boats brought more log rafts to the site, including the Garuda 2 which normally takes tourists around the park.

On 22nd June three barges were observed in the Kumai Bay area – The Rimba Megah and Yi Jin I were preparing to load, while the Malian 02 had already begun taking ramin on board. This last barge was reported arriving with its illegal cargo at the Javanese port of Surabaya on 14th July, by which time it mysteriously acquired legal papers ⁽¹⁴⁾.

The Ramin Trade

Ramin (*Gonystylus spp.*) is a tropical hardwood tree species, occurring in lowland freshwater swamp and peat swamp forests. Its distribution is confined to Borneo, Sumatra and Peninsular Malaysia and all of the 27 different species of ramin for which data exists have been classified as vulnerable ⁽¹⁵⁾.

The status of ramin was discussed at the 1994 meeting of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Concerns were raised over the effects of over-exploitation and habitat loss on the survival of the species, but failed to result in trade restrictions, mainly due to opposition from Malaysia ⁽¹⁶⁾.



© P. King/IBDF

menghindari masalah dengan pihak yang berwenang di Malaysia. Ia juga berbicara tentang pelaku bisnis dari Pontianak yang mengatur pengantaran dan memiliki koneksi-koneksi penting untuk 'pemutihan-status' kayu tersebut di pasar internasional, termasuk Eropa. Menurut para awak kapal, terdapat dua kapal lain yang juga akan menuju ke Kuching. Di sana ramin akan laku dijual Rp 2 juta (\$300) per meter kubik.

Besarnya skala dan komersialisasi penebangan kayu yang berlangsung di Tanjung Puting ini digambarkan dengan jelas oleh kehadiran tongkang-tongkang baja di Teluk Kumai. Mereka mengangkut ramin yang dibawa keluar dari Taman Nasional dalam rakit-rakit kecil.

EIA/Telapak menyaksikan dua tongkang pada satu hari saja pada bulan Mei 1999, berlabuh dekat mulut Sungai Sekonyer. Kegiatan terpusat di salah satu tongkang, "Sapphire 7". Dengan sebuah crane kayu ramin yang mengambang di sekitarnya ditangguk ke atas.

Serombongan perahu *klotok* menarik lebih banyak lagi rakit ramin ke sana, termasuk *klotok* Garuda yang biasanya mengangkut wisatawan ke sekitar taman nasional.

Pada tanggal 22 Juni tiga tongkang diamati berada di kawasan Teluk Kumai, yaitu Rimba Megah dan Yi Jin I sedang bersiap untuk memuat, sementara Malian 02 sudah mulai memuat ramin ke anjungannya. Tongkang terakhir ini dilaporkan tiba dengan muatan curiannya di pelabuhan Surabaya di Jawa pada tanggal 14 Juli, yang anehnya pada saat itu sudah disertai surat-surat resmi ⁽¹⁴⁾.

Perdagangan Ramin

Ramin (*Gonystylus spp.*) adalah spesies kayu keras tropis, terdapat di rawa air payau di dataran rendah dan hutan rawa bakau. Penyebarannya terbatas di Borneo, Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Seluruh 27 spesies ramin yang tercatat, semuanya digolongkan sebagai terancam kepunahan ⁽¹⁵⁾.

Status ramin dibicarakan dalam pertemuan CITES tahun 1994. Pada saat itu keprihatinan akan kelangsungan hidup spesies ini dilontarkan akibat eksploitasi yang berlebihan dan habitat yang menyusut. Akan tetapi, keprihatinan ini tidak sampai terwujud dalam bentuk pembatasan perdagangan, terutama karena tentangan dari pihak Malaysia ⁽¹⁶⁾.

Ramin merupakan spesies tanaman yang

Left:
Ramin logs

Ramin is the most valuable tree species found in Borneo's swamp forests, but is vulnerable to commercial extraction due to low regeneration rates in this ecosystem ⁽¹⁷⁾. It has never been successfully cultivated as a plantation timber ⁽¹⁸⁾. Between 1980 and 1987 statistics showed over 7.6 million cubic metres of ramin was logged in Indonesia's forest concessions, an amount exceeded only by meranti ⁽¹⁹⁾. Production has fallen steadily during the 1990s as supplies become scarcer, and by 1997 production had dropped to 489,000 cubic metres ⁽²⁰⁾.

On the international market ramin is a much sought-after luxury timber due to its lightness, blond appearance, straight grain and good finish. The main uses include furniture components and veneers, futon beds, dowels, and mouldings such as skirting, cornices and picture frames. Ramin is also used in snooker cues, wooden toys and window blinds. There is an insignificant market for ramin within Indonesia, with the vast majority of the timber exported to the USA, Europe, and Asia.

The top export markets for Indonesian ramin are Taiwan, Japan, Singapore, Hong Kong, USA, Italy and the UK ⁽²¹⁾. Italy's tradition as a centre for fine furniture manufacture makes it Europe's largest importer of ramin, while the US market has grown recently partly due to the increased use of ramin for futons and picture frames ⁽²²⁾.

Its use in luxury products and increasing scarcity make ramin a valuable timber on the international market. Prices vary from \$600 per cubic metre for sawn ramin to \$1,200 per cubic metre for moulded ramin ⁽²³⁾.

paling berharga yang dapat ditemukan di hutan rawa Borneo, tetapi sangat rentan terhadap eksploitasi komersial akibat tingkat regenerasinya yang rendah dalam ekosistem ini ⁽¹⁷⁾. Ramin tidak pernah berhasil dibudidayakan sebagai kayu perkebunan ⁽¹⁸⁾. Antara tahun 1980 dan 1987 statistik menunjukkan lebih dari 7,6 juta meter kubik ramin telah ditebang di hutan Indonesia. Jumlah ini menempati urutan kedua setelah meranti ⁽¹⁹⁾. Angka produksi jatuh secara tetap selama tahun 1990an karena pasokan semakin langka, dan pada tahun 1997 angka produksi jatuh hingga sebesar 489.000 meter kubik ⁽²⁰⁾.

Di pasar internasional ramin merupakan kayu mewah yang banyak dicari karena ringan, penampilannya yang mengkilat, berserat lurus dan penampilan akhirnya bagus. Kegunaan utamanya adalah sebagai komponen dan pelapis perabotan rumah tangga, ranjang futon, dan dalam bentuk kayu cetak seperti untuk dekorasi pelapis pinggiran dinding, dan bingkai lukisan. Ramin juga digunakan sebagai tongkat permainan bola sodok, mainan kayu dan tirai jendela. Untuk Indonesia pasar dalam negeri untuk ramin tidak terlalu berarti. Sebagian besar kayu diekspor ke Amerika Serikat, Eropa dan Asia.

Pasar ekspor utama untuk ramin dari Indonesia adalah Taiwan, Jepang, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Italia dan Inggris ⁽²¹⁾. Tradisi Italia sebagai pusat pembuatan perabot rumah tangga bercita rasa tinggi menjadikan Eropa sebagai importir ramin terbesar. Sementara pasar Amerika Serikat akhir-akhir ini berkembang sebagian karena meningkatnya penggunaan ramin untuk futon dan bingkai lukisan ⁽²²⁾.

Penggunaan ramin dalam barang produksi mewah dan semakin langkanya pasokan membuat ramin menjadi kayu mahal di pasar internasional. Harganya berkisar dari \$600 per meter kubik untuk ramin gergajian hingga \$1.200 per meter kubik untuk ramin yang telah dibentuk ⁽²³⁾.

Below:
Sawn ramin can fetch
\$900 per cubic metre

*Ramin olahan dapat
dijual seharga Rp
5.850.000 per meter
kubik (1 USD =
Rp 6.500)*





*Left:
Confiscated logs outside
the park headquarters in
Kumai*

*Kayu sisaan di luar
Kantor Taman Nasional
di Kumai*

Along the Sekonyer River

It is the timber barons of Kumai and Pangkalanbun who are responsible for the havoc descending along the river systems in the west of Tanjung Puting.

The Sekonyer River, along which a series of research stations, tourist lodges and ranger posts are located, was untouched by illegal logging until the summer of 1998. The situation has rapidly spiralled out of control.

In mid-May an EIA/Telapak team travelled along the river and found a deteriorating situation. A few days before a team of rangers from the PKA (Forest Police and Conservation Department) provincial office in Palangkaraya had conducted an enforcement operation in Tanjung Puting, confiscating 300 illegal ramin logs ⁽²⁴⁾.

Sepanjang Sungai Sekonyer

Para raja kayu dari Kumai dan Pangkalanbun lah yang bertanggung jawab untuk kerusakan besar sepanjang sistem sungai di sebelah barat Tanjung Puting.

Sepanjang Sungai Sekonyer, dimana terdapat serangkaian stasiun penelitian, pondok turis dan pos pengawas, hingga musim kemarau 1998 tidak tersentuh oleh penebangan liar. Namun situasi cepat sekali berkembang tak terkendali.

Pada pertengahan Mei kelompok EIA/Telapak menyusuri sepanjang sungai dan menyaksikan kondisi yang memburuk. Beberapa hari sebelumnya sebuah kelompok dari PHPA dari kantor propinsi di Palangkaraya mengadakan operasi pengawasan di Tanjung Puting. Mereka menyita



© Dave Curry

Above:
New orangutan feeding station at Pondok Tanggui, moved to avoid loggers

Stasiun yang baru untuk pemberian makanan bagi orang utan di Pondok Tanggui, dipindahkan untuk menjauhi para penebang

The confiscation provoked an angry reaction from the loggers, who had already paid the local PKA rangers for a "permit" to log in the park. Local people spoke of a further levy demanded by the rangers of Rp.10, 000 (\$1.5) for each log emerging from the Sekonyer⁽²⁵⁾.

The boat driver who had transported the Palangkaraya team into the park was attacked by loggers armed with machetes, and was forced to dive into the Sekonyer River to escape. After an angry confrontation between loggers and rangers at the Tanjung Harapan post, most of the rangers were pulled out of the park – leaving it at the mercy of the loggers.

Evidence of unbridled illegal logging was recorded all along the Sekonyer. The sight of illegal log rafts and the sound of chainsaws from within the park were commonplace over a five-day period.

Two logging camps were entrenched on either side of the proboscis monkey research centre at Nantai Lengkuas, and a system of wooden rails had been built to move the logs from the interior forest to the river.

The situation at the ranger post of Pondok Tanggui further downstream was even worse, surrounded on three sides by logging camps. Rangers said a team of 40 loggers carrying machetes had walked through the post recently in a show of strength.

One of the most famous ex-captive orangutans of Tanjung Puting, called Gistok, had disappeared from Pondok Tanggui. The rangers feared loggers had killed him, as the orangutan was domesticated and had never left the post for more than a day before. The proximity of the logging camp had also forced the rangers to move the orangutan feeding station to a new position, further away from the loggers.

On a single day EIA/Telapak observed six large

300 kayu bulat ramin curian⁽²⁴⁾.

Penyitaan ini memancing kemarahan para penebang, yang telah membayar petugas PKA setempat untuk "ijin" menebang di taman nasional. Masyarakat setempat juga menyebutkan pungutan lain yang diminta oleh petugas sebesar Rp. 10.000,- (\$1,50) untuk setiap kayu yang muncul dari Sungai Sekonyer⁽²⁵⁾.

Pengemudi kapal yang membawa tim Palangkaraya ke taman nasional diancam oleh para penebang dengan menggunakan clurit, dan terpaksa menyelam ke sungai untuk menyelamatkan diri. Setelah peristiwa bentrokan antara penebang dan petugas di pos Tanjung Harapan tersebut, sebagian besar jagawana ditarik dari taman nasional – meninggalkan sepenuhnya kawasan itu di tangan para penebang liar.

Bukti merajalelanya penebangan liar terekam di sepanjang Sungai Sekonyer. Selama lima hari kayu curian berakit-rakit dan bunyi *chainsaw* tak henti-henti bersumber dari dalam taman nasional.

Dua pangkalan penebang dibangun berdekatan dengan pusat penelitian bekantan di Nantai Lengkuas, dan sebuah sistem rel kayu dibangun untuk membawa kayu dari dalam hutan ke sungai.

Situasi di pos Pondok Tanggui ke arah muara lebih parah lagi, karena ketiga sisinya dipagari oleh camp para penebang. Para jagawana mengatakan bahwa sekelompok penebang terdiri dari 40 orang dengan membawa clurit baru-baru ini dengan sengaja berjalan melewati pos untuk unjuk kekuatan.

Salah satu orangutan yang paling terkenal di Tanjung Puting, bernama Gistok menghilang dari Pondok Tanggui. Para jagawana kuatir para penebang telah membunuhnya, karena orangutan itu jinak dan sebelumnya tidak pernah keluar dari pos lebih lama dari satu hari. Dekatnya pangkalancamp para jagawana untuk memindahkan lokasi pemberian makan orangutan ke posisi yang baru, menjauhi para penebang.

Pada satu hari saja tim EIA/Telapak mengamati enam rakit kayu besar mengarus ke muara Sekonyer. Rakit-rakit tersebut seluruhnya terdiri dari kayu ramin, beberapa diantaranya digergaji sebagian dan yang lainnya kayu bulat. Rakit yang terbesar panjangnya 100 meter dan terdiri dari 200 potongan ramin. Selama dua jam saja terhitung ada lebih dari 800 kayu ramin. Pada beberapa lokasi di sepanjang sungai para penebang sibuk mengikat kayu ramin menjadi rakit-rakit yang lebih banyak.

Kelompok penebang yang beroperasi sepanjang sungai Sekonyer menerima upah kecil untuk kerja keras mereka dan diatur oleh segelintir per-

log rafts moving down the Sekonyer. The rafts were composed solely of ramin, in some cases part-sawn and in others raw logs. The largest raft snaked for over 100 metres and was made up of over 200 ramin pieces. Altogether over 800 ramin logs were counted during a two-hour period. At several sites along the river loggers were busy lashing ramin logs into yet more rafts.

The logging gangs operating along the Sekonyer receive a pittance for their labours and are organised by a handful of middlemen based in Kumai, notably Akiong. These people ferry supplies along the river, such as fuel for the chainsaws, and pay the loggers around Rp.25,000 (\$4) for each cubic metre of ramin. They then sell the timber to sawmills for between Rp.300,000 (\$46) and 600,000 (\$90) per cubic metre. Two of the Kumai middlemen were observed travelling up the Sekonyer by speedboat towards the logging camps.

Between 14th June and 18th June almost 500 ramin logs were moved down river, owned by the Kumai middlemen Bawai, Kusnadi, Wito, Sabur and Sipur⁽²⁶⁾. The following month the arrival of a joint enforcement team, comprising park rangers, police and the army provoked anger among the loggers and some residents of Kumai. The park was closed for a day and the operation led to the seizure of 800 logs in the Natai Lengkuas area.

Within a year the situation along the Sekonyer has radically changed – from being relatively untouched by timber theft, to being blatantly logged in full view of the authorities charged with protecting the park. The most valuable tree species in the park – ramin – is the sole target for the Sekonyer logging gangs, and is being removed at an alarming rate.

The logging frenzy is reported to be even worse in the Buluh Besar River area, to the south of the Sekonyer and in the centre of the park. On a single day in July eight logging camps were spotted on the banks of the Buluh Besar, and huge log piles of ramin were awaiting transport down the river. Over 1,500 logs were counted and an extensive network of wooden rails for moving the logs permeated the area. The owners of the logs included Basri, Acong and Jalil⁽²⁷⁾.

Logging in the East of the Park

The nature of illegal logging activities in the more remote eastern region of Tanjung Puting differs significantly from the Sekonyer and Buluh Besar operations. The east has endured logging for far longer, and the valuable ramin tree has largely been removed from the area, forcing the illegal loggers to target less profitable

antara yang berpangkal di Kumai. Mereka inilah yang mengirimkan pasokan ke sepanjang sungai, seperti bahan bakar untuk *chainsaw*, dan membayar penebang sekitar Rp.25.000,- (\$4) untuk setiap meter kubik kayu ramin. Mereka lalu menjual kayu tersebut ke *sawmill* seharga antara Rp.300.000,- (\$46) dan Rp.600.000,- (\$90) per meter kubik. Dua pedagang perantara dari Kumai diamati menuju ke pangkalan penebang dengan *speedboat* di Sungai Sekonyer.

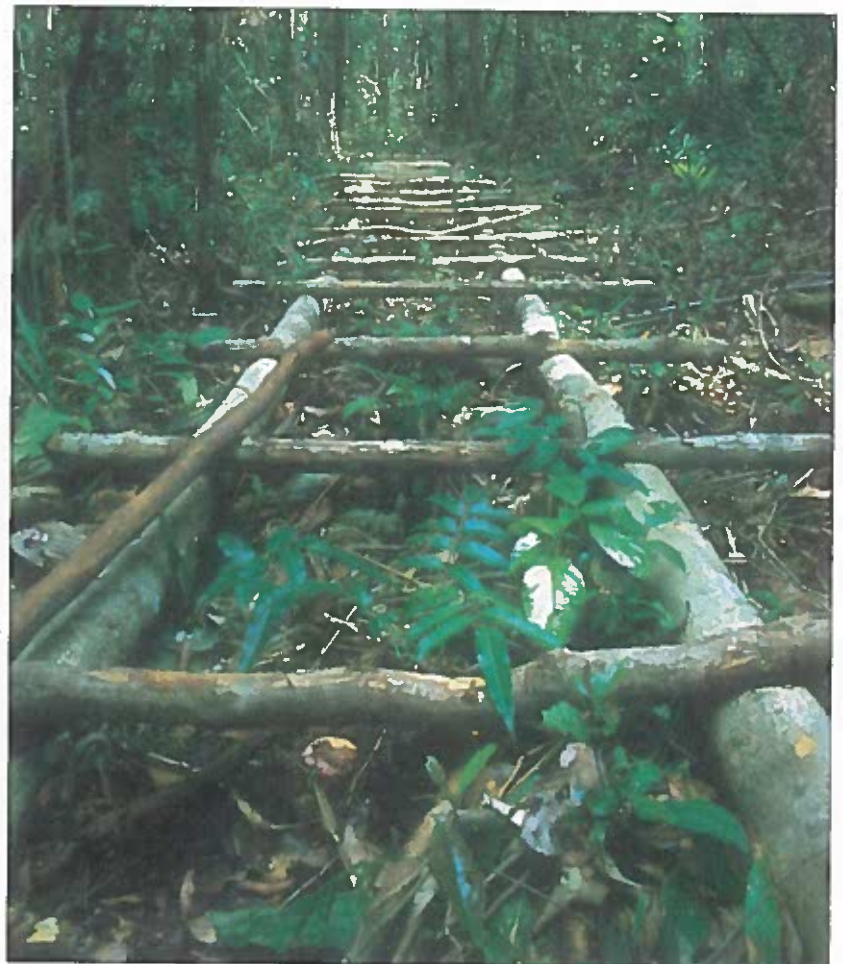
Antara tanggal 14 dan 18 Juni hampir 500 kayu ramin digulirkan ke sungai. Pemiliknya para pedagang perantara dari Kumai yaitu Bawai, Kusnadi, Wito, Sabur dan Sipur⁽²⁶⁾. Bulan berikutnya kedatangan tim inspeksi gabungan yang terdiri dari jagawana, polisi dan militer memancing kemarahan penebang dan sejumlah penduduk Kumai. Taman Nasional ditutup selama satu hari dan operasi tersebut berhasil menyita 800 kayu bulat di daerah Natai Lengkuas.

Dalam satu tahun kondisi di sepanjang Sungai Sekonyer telah berubah, yang sebelumnya relatif tidak tersentuh oleh pencuri kayu, telah dirampok terang-terangan di depan mata petugas yang berwenang melindungi taman nasional. Spesies pohon yang paling bernilai di taman nasional – ramin – merupakan sasaran tunggal kelompok penebang Sekonyer, dan telah habis-habisan dikuras.

“...Kedatangan tim inspeksi gabungan yang terdiri dari jagawana, polisi, dan militer memancing kemarahan penebang dan sejumlah penduduk kumai”

*Below:
Logging rail in the Buluh Besar area*

Rel untuk logging di daerah Buluh Besar



© P. Knight/BDF

“At least 10,000 cubic metres of illegal timber is being taken from inside the park each year from the Bangkuang River district alone”



© P. Kishida/BRF

*Above:
Logging camp beside the
Buluh Besar River, the
centre of the National
Park*

*Camp para penebang di
tepi Sungai Buluh Besar,
di tengah Taman
Nasional*

dipterocarps like meranti and bangkirai instead. Illegal logging is so entrenched in the area that roads have been built inside the park to take the timber out.

The eastern boundary of Tanjung Puting runs parallel to the Seruyan River, which is located approximately seven kilometres to the east of the park. The port of Kuala Pembuang is found where the Seruyan reaches the Java Sea, and there are several tributaries running into the main river which provide access into the park.

One of these tributaries is the Bangkuang River, in Pembuang Hulu district. An EIA/Telepak team spent a week in this region building up a detailed picture of illegal logging activities and identified the people running the logging gangs.

The upstream area of the Bangkuang River is divided up by the logging bosses into informal “concessions” inside Tanjung Puting. These middlemen – seven of whom were identified operating in the area – are based in local villages along the Seruyan River, including Tanjung Hanau, Benua Usang, Telaga Pulang and Baung ⁽²⁶⁾.

The local bosses scout out new logging areas inside the park by surveying parts of the forest on foot and counting the density and size of commercial tree species. When a suitable “concession” is discovered it is marked to keep out other loggers, although conflict over the more abundant forest areas can occur.

With a new area now claimed and marked out, the boss returns to the village to recruit a

Merajalelanya penebangan liar ini bahkan dilaporkan lebih buruk di daerah Sungai Buluh Besar, di selatan Sekonyer dan di tengah taman nasional. Pada suatu hari di bulan Juli, delapan pangkalan penebang didapati di pinggiran sungai Buluh Besar, dan tumpukan besar kayu ramin menunggu untuk diturunkan ke sungai. Ditemukan lebih dari 1.500 kayu bulat dan jaringan rel kayu yang panjang merambat ke segala penjuru untuk menggulirkan kayu ke sungai. Pemilik kayu-kayu tersebut antara lain Basri, Acong dan Jalil ⁽²⁷⁾.

Penebangan di Sebelah Timur Taman Nasional

Kegiatan penebangan liar di daerah timur Tanjung Puting yang lebih terpencil sangat berbeda dari kegiatan di Sekonyer dan Buluh Besar. Di sebelah timur kegiatan penebangan sudah berjalan lebih jauh masuk ke dalam kawasan taman nasional dan kayu ramin yang mahal hampir sebagian besar sudah ditebang. Keadaan ini mendorong para penebang liar untuk mengambil *dipterocarps* yang kurang begitu berharga seperti meranti dan bangkirai. Penebangan liar juga merambah ke dalam kawasan, bahkan telah dibangun jalan kendaraan roda empat untuk mengangkut kayu dari dalam kawasan.

Batas selatan Tanjung Puting sejajar dengan Sungai Seruyan, yang kira-kira berjarak tujuh kilometer dari bagian timur taman nasional. Bandar Kuala Pembuang terletak di pertemuan Sungai Seruyan dengan Laut Jawa. Dari sana ter-

logging gang. The gangs consist of between five and 12 people, both chainsaw operators and labourers to pull the logs out, who work the area for around six months. Loggers claim to take out around 2,000 cubic metres of timber over the six months from each illicit concession. As five distinct "concessions" were identified, at least 10,000 cubic metres of illegal timber is being taken from inside the park each year from the Bangkuang River district alone.

EIA/Telapak investigated one of these concessions to find out how the logging is organised. The boss of the area was identified as Jali from Tanjung Hanau. Using a Global Positioning System the investigators confirmed the presence of four different logging camps within the park working on Jali's "concession". The loggers working in the area are both local people and from other parts of Indonesia, including Lombok and East Java.

The logging team takes mixed wood such as meranti and bangkirai, which can be floated on the rivers out of the logging area. The process of moving the timber from the logging area to the Seruyan River is torturous and can take up to four months, but in Jali's area a crude road had been cut out of the forest to allow the use of a truck for part of the route. Wooden rails were

dapat beberapa sungai cabang yang bermuara ke sungai besar. Sungai-sungai kecil itulah yang menjadi jalan masuk ke taman nasional.

Salah satu dari sungai cabang itu adalah Sungai Bangkuang, di Kecamatan Pembuang Hulu. Tim EIA/Telapak berada di daerah tersebut selama satu minggu untuk mengumpulkan gambaran terinci tentang kegiatan penebangan liar dan menyelidiki mereka yang berada di balik kelompok penebang tersebut.

Daerah hulu Sungai Bangkuang dibagi oleh para bos penebangan menjadi beberapa daerah "konsesi" informal di dalam kawasan Tanjung Puting. Para perantara ini - tujuh diantaranya diamati beroperasi di kawasan itu - berpangkal di desa-desa sepanjang Sungai Seruyan, antara lain Tanjung Hanau, Benua Usang, Telaga Pulang dan Baung⁽²⁸⁾.

Para bos lokal mencari daerah penebangan baru di dalam kawasan taman nasional dengan berjalan kaki menelusuri hutan dan menghitung kepadatan dan ukuran spesies pohon komersial. Ketika mereka menemukan "konsesi" yang cocok daerah itu ditandai agar tidak ditebang oleh penebang lain. Namun demikian, perebutan daerah hutan yang lebih kaya dapat saja terjadi sewaktu-waktu.

Setelah mengakui dan menandai daerah baru, bos kembali ke desa untuk mempekerjakan

"Daerah hulu Sungai Bangkuang dibagi oleh para bos penebangan menjadi beberapa daerah "konsesi" informal..."

*Below:
Logging road inside
Tanjung Puting*

*Jalan logging di dalam
kawasan Taman
Nasional Tanjung
Puting*





© EIA/Telapak

Above:
Trucks are used to move the stolen timber in the east of the National Park

Truk dipakai untuk mengangkut kayu curian di sebelah timur taman nasional

also discovered in the area and are used to pull the logs along.

In the investigation area over 30 small log piles were counted. After being sawn into about three sections per log and stacked, the timber is pulled out along the rails. A 20-tonne truck is then used to transfer the timber to the site of a large log pond on the Bangkuang River. At least two kilometres of road was observed within the park. The logs are moved down the river during the rainy season to the village of Tanjung Harau, on the banks of the Seruyan. EIA/Telapak saw over 130 logs in the pond, and over 1,000 log pieces in total spread across the "concession" area.

At the village the local boss takes control of the timber and pays the logging gang around Rp 50,000 (\$8) per cubic metre. Out of this payment the chainsaw operator will receive about Rp 12,000 (\$2) for each tree felled, the truck driver gets Rp10, 000 (\$1.5) per cubic metre, and the team of labourers receive about Rp 25,000 (\$4) ⁽²⁹⁾.

The timber is then transported down the Seruyan River in large rafts, destined for one of the 26 sawmills of Kuala Pembuang. While the local boss pays just Rp 50,000 for each cubic metre of illegal timber, he can expect to sell it for up to Rp 250,000 (\$40) in Kuala Pembuang.

Logging activities in the Baung River area inside Tanjung Puting were also documented. In an area inside the park known locally as Natai Empat seven separate logging camps were counted. The main camp appeared to be a per-

kelompok penebang. Satu kelompok biasanya terdiri dari lima sampai 12 orang. Kelompok ini terdiri dari operator *chainsaw* dan buruh yang mengangkut kayu keluar. Mereka sudah bekerja di kawasan itu sekitar enam bulan. Para penebang mengaku mereka telah mengambil 2.000 meter kubik kayu selama enam bulan di sana dari konsesi ilegal. Dari lima "konsesi" yang menonjol, sedikitnya 10.000 meter kubik kayu curian dibawa keluar dari taman nasional setiap tahunnya, hanya dari Sungai Bangkuang saja.

EIA/Telapak menyelidiki salah satu konsesi tersebut dan menemukan bagaimana penebangan tersebut diatur. Bos dari daerah tersebut diketahui bernama Jali dari Tanjung Hanau. Dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), para investigator memastikan kehadiran empat pangkalan penebangan yang berbeda di dalam kawasan taman nasional bekerja untuk "konsesi" milik Jali. Para penebang yang bekerja di kawasan tersebut berasal dari daerah setempat atau dari daerah lain di Indonesia, misalnya dari Lombok dan Jawa Timur.

Kelompok penebang mengambil kayu campuran seperti meranti dan bangkirai, yang dapat dihanyutkan lewat sungai keluar dari daerah penebangan. Proses mengeluarkan kayu dari daerah penebangan ke Sungai Seruyan sangat berat dan dapat memakan waktu sampai empat bulan. Akan tetapi, di wilayah kekuasaan Jali telah dibangun jalan sederhana yang memotong kawasan hutan agar truk dapat masuk. Rel kayu juga ditemukan di daerah tersebut dan

manent settlement within Tanjung Puting, with a range of crops being grown and up to 30 loggers in residence. The loggers knew they were inside a protected area.

Again the forest was dissected by a network of rails for pulling the logs out. Three separate rail systems were seen, each with a series of spurs running off to log collection sites. One main rail appeared to be newly constructed and ran for over one kilometre. Ramin has also disappeared from this part of the park, leaving the loggers to seek dipterocarps like meranti instead.

From the evidence accumulated in the east of Tanjung Puting, it is clear that the illegal logging here has been proceeding for a number of years and has entered a distinct second phase. While the first phase involves the specific targeting of ramin – the most valuable tree found in the park – and is characterised by events along the Sekonyer and Buluh Besar river, loggers have virtually stripped the east clean of this tree. One of the illegal loggers operating in the Bangkuang River said ramin had finished in the area over four years ago.

Instead commercial dipterocarps are now being felled, which although not as valuable as ramin still offer considerable profits to those behind the logging. This second phase may ulti-

digunakan untuk menarik kayu keluar kawasan.

Di kawasan yang diselidiki tersebut terhitung terdapat lebih dari 30 tumpukan kayu kecil. Setelah digergaji menjadi tiga bagian per kayu bulat dan ditumpuk, kayu tersebut ditarik keluar sepanjang rel. Truk yang mampu memuat 20 ton kayu lalu digunakan untuk mengangkut kayu ke kolam kayu besar di Sungai Bangkuang. Paling tidak jalan yang ditemukan di dalam kawasan taman nasional panjangnya dua kilometer. Kayu bulat dipindahkan ke sungai pada musim penghujan ke desa Tanjung Harau, di pinggir sungai Seruyan. Tim EIA/Telapak menemukan lebih dari 130 kayu di tempat penimbunan, dan lebih dari 1000 potongan kayu secara keseluruhan tersebar di kawasan “konsesi”.

Di desa bos lokal mengambil alih kayu dan membayar kelompok penebang sekitar Rp.50.000,- (\$8) per meter kubik. Dari pembayaran ini operator *chainsaw* akan menerima sekitar Rp.12.000,- (\$2) untuk setiap pohon yang ditebang, sopir truk memperoleh Rp.10.000,- (\$1.50) per meter kubik, dan kelompok buruh menerima sekitar Rp.25.000,- (\$4)⁽²⁹⁾.

Kayu lalu dialirkan sepanjang Sungai Seruyan dalam rakit-rakit besar, menuju ke salah satu *sawmill* di Kuala Pembuang. Sementara bos lokal hanya membayar Rp.50.000,- untuk setiap

Below:
*Illegal log raft moving
down the Sekonyer River*

*Rakit kayu para
penebang liar menyusuri
Sungai Sekonyer*



mately be even more damaging to the park as more tree species are being felled.

From detailed investigations a clear picture of the progression of the logging of Tanjung Puting has emerged. The logging operations have been moving steadily towards the core part of the park, which contains most of the orangutan research areas. As ramin has been removed from the south and east of the park, the logging gangs make ever-deeper incursions in search of the timber. One of the local bosses from the east has been surveying forest just ten kilometres from Camp Leakey. Unless the wave of logging is halted soon not a single part of Tanjung Puting will remain unscathed.

Below:
Logs surround a camp in east Tanjung Puting

Kayu-kayu di sekitar camp penebang di bagian timur Tanjung Puting

Bottom:
Rails run deep into the centre of the park

Rel logging menembus hingga ke jantung taman nasional



© EIANTelapak



© EIANTelapak

meter kubik kayu curian, ia dapat mengharapkan penjualan kayu itu mencapai harga Rp.250.000,- (\$40) di Kuala Pembuang.

Kegiatan penebangan di daerah Sungai Baung di dalam kawasan Tanjung Puting juga terdokumentasi. Di suatu daerah dalam kawasan taman nasional, yang dikenal oleh masyarakat lokal sebagai Nantai Empat, ditemukan tujuh pangkalan penebangan terpisah. Pangkalan utama tampak seperti kediaman tetap di dalam kawasan. Pangkalan itu dihuni 30 orang dan mereka bercocok tanam berbagai jenis tanaman pangan. Para penebang sadar bahwa mereka tinggal di dalam kawasan yang dilindungi.

Lagi-lagi hutan telah dibagi-bagi oleh jaringan rel untuk menarik kayu keluar. Tampak tiga sistem rel yang berbeda, masing-masing memiliki serangkaian cabang menuju ke lokasi pengumpulan kayu. Satu rel utama tampak masih baru dan membentang sepanjang lebih dari satu kilometer. Ramin juga sudah punah di bagian taman nasional ini, memaksa para penebang untuk mencari *dipterocarps* seperti meranti.

Dari bukti yang dikumpulkan di sebelah timur Tanjung Puting, jelaslah bahwa penebangan liar telah berlangsung selama bertahun-tahun dan telah memasuki tahap kedua. Ramin – kayu yang paling berharga di kawasan taman nasional – menjadi sasaran utama pada tahap pertama. Pengamatan atas kegiatan di sepanjang sungai Sekonyer dan Buluh Besar menyimpulkan bahwa para penebang telah membersihkan bagian timur kawasan dari jenis pohon ini. Salah satu penebang liar yang beroperasi di Sungai Bangkuang mengatakan bahwa kayu ramin di daerah itu telah habis sejak empat tahun yang lalu. Sekarang yang menjadi sasaran adalah *dipterocarps* komersial, yang walaupun harganya tidak setinggi ramin, tapi masih dianggap menguntungkan bagi mereka yang berada dibalik penebangan liar ini. Tahap kedua ini bahkan dapat lebih menghancurkan taman nasional karena semakin banyak pohon yang ditebang.

Dari investigasi terinci ini didapatkan suatu gambaran jelas tentang perkembangan kegiatan penebangan di Tanjung Puting. Kegiatan penebangan secara pasti semakin bergeser mendekati bagian dalam taman nasional, yang sebagian besar merupakan wilayah penelitian orangutan. Karena ramin telah dikuras dari bagian selatan dan timur taman nasional, kelompok penebang semakin merambah ke dalam untuk mencari kayu. Salah satu bos lokal dari timur telah melakukan survai sampai hanya sekitar sepuluh kilometer dari Camp Leakey. Jika gelombang penebangan ini tidak dihentikan, tidak lama lagi tidak ada sedikitpun bagian dari kawasan Tanjung Puting yang tidak terjamah.

Gunung Leuser National Park

History and Importance

Gunung Leuser is one of the largest Indonesian National Parks covering 890,000 hectares ⁽¹⁾ and situated in the north of the island of Sumatra. It formerly consisted of a number of nature reserves. Its biodiversity is staggering, boasting many high profile mammals such as the orangutan, Sumatran tiger, Sumatran rhinoceros, Malayan sun bear, Asian elephant and clouded leopard ⁽²⁾. Of the 10,000 plant species recorded in the West Indo-Malayan region, it is estimated that 45% are found in the Leuser ecosystem ⁽³⁾.

Gunung Leuser is largely mountainous covering more than 100 kilometres of the Bukit Barisan mountain range, but it also encompasses the Sumatran west coast in South Aceh Province including turtle beaches, mangroves, swamp land and lowland rainforest.

The park and the surrounding ecosystem are critically important for protection of the water supply, so vital for the forests and the people living in surrounding areas. The swamp forests act as a carbon sink and also absorb water, so preventing flooding further downstream in agricultural areas. Without this ecological protection, flooding becomes more widespread ⁽⁴⁾.

Political and Management Problems

There has been an enormous shift in power since the Soeharto regime collapsed in May

Taman Nasional Gunung Leuser

Sejarah dan Arti Pentingnya

Gunung Leuser adalah salah satu Taman Nasional Indonesia yang terluas, terletak di sebelah utara Pulau Sumatra, mencakup wilayah seluas 890.000 hektar ⁽¹⁾. Dahulu wilayah ini terdiri dari beberapa suaka alam yang kemudian digabungkan menjadi satu taman nasional. Kawasan ini terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang menakjubkan. Beberapa mamalia yang terkenal ditemukan di sini seperti orangutan, harimau Sumatra, badak Sumatra, beruang madu, gajah sumatera dan macan dahan ⁽²⁾. Dari 10.000 spesies tanaman yang tercatat di wilayah Indo-Malaya Barat, diperkirakan 45% nya terdapat di kawasan Leuser ⁽³⁾.

Gunung Leuser sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan. Melintas sepanjang lebih dari 100 kilometer di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Kawasan ini juga mencakup pantai barat Sumatra di Propinsi Aceh sebelah selatan, meliputi pantai penyu, hutan bakau, tanah rawa dan hutan lahan basah.

Taman Nasional dan ekosistem di sekitarnya sangat penting untuk melindungi suplai air, yang sangat penting bagi hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hutan rawa berfungsi sebagai penyerap karbon dan air, yang mencegah air meluapi sungai di daerah pertanian. Tanpa perlindungan ekologis ini, bencana banjir akan semakin meluas ⁽⁴⁾.



*Left:
Loggers in the forests of
Gunung Leuser*

*Para penebang liar di
hutan di dalam kawasan
Taman Nasional
Gunung Leuser*

1998. A development and management project for the Leuser ecosystem was created during the old political regime, designed to run for seven years and to hand over the staff, procedures and facilities to a non-profit NGO. In this way the park's management is to be privatised⁽⁶⁾. This project, known as the Leuser Management Unit (LMU), is a joint Government of Indonesia and European Union funded project (Ecu 50 million). It is run from the North Sumatran city of Medan and is designed to cover the park and the surrounding ecosystem, in total 2.5 million hectares. More than two million people live in the immediate surrounding area⁽⁶⁾.

*Below:
Logging road cutting
through a village
plantation near
Gunung Leuser*

*Jalan logging memotong
ladang penduduk di
dekat Gunung Leuser*



Masalah-Masalah Politis dan Manajemen

Sejak rejim Soeharto ditumbangkan pada bulan Mei 1998, telah terjadi pegeseran besar dalam peta kekuasaan Indonesia. Sebuah proyek untuk pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Leuser dibentuk pada masa rejim yang lalu. Proyek tersebut direncanakan untuk bekerja selama tujuh tahun. Setelah periode tersebut baik staf, prosedur, maupun fasilitas akan diserahkan kepada LSM. Dengan cara tersebut diharapkan pengelolaan taman nasional akan diswastanisasikan pada akhirnya⁽⁶⁾. Proyek ini, yang kemudian dikenal sebagai dikenal sebagai LMU, merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Eropa (EU) dengan dana sekitar 50 juta Ecu. LMU dikelola dari ibukota Sumatra Utara, Medan, dan dirancang untuk mengelola kawasan taman nasional dan ekosistem di sekitarnya. Luas keseluruhan kawasan yang dikelola tersebut adalah 2,5 juta hektar. Lebih dari 2 juta orang tinggal di seluruh kawasan tersebut⁽⁶⁾.

Sasaran LMU adalah melindungi ekosistem dengan cara memperluas taman nasional, membantu mengembangkan wilayah sekitar taman nasional dan menciptakan zona penyangga. Untuk mencapai sasaran ini, LMU mengadakan penelitian dan pemantauan dan membantu mengembangkan "kegiatan ekonomi yang layak" di sekitar batas taman nasional⁽⁷⁾.

Era reformasi dalam kehidupan politik Indonesia memberi sejumlah peluang kepada pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan finansial dan kekuatan politik dengan praktek-praktek yang melawan hukum. Masyarakat sendiri menjadi semakin sadar akan adanya kesempatan bagi mereka untuk mengambil alih lahan mereka kembali. Di beberapa daerah upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum yang masih berlaku.

Diantara mereka yang ikut bermain air keruh adalah para raja kayu lokal yang didukung oleh militer dan polisi. Mereka yang terutama memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini. Mereka berbuat semaunya dengan didukung modal keuangan dan mereka siap memanfaatkan masyarakat setempat untuk meraih tujuan. Untuk kerakusan mereka, sumber daya dikuras dan masyarakat lokal yang bekerja untuk mereka dibayar dengan sangat minim. Kekuasaan otoritarian (rejim Soeharto) berganti dengan rejim eksploitasi finansial dan sumber daya alam.

LMU melihat era yang baru ini sebagai perubahan yang berarti untuk memperluas

LMU's stated goal is to conserve the ecosystem by expanding the park, helping to develop areas surrounding the park and to create buffer zones. To achieve these aims the project carries out research and monitoring and is helping to develop "appropriate economic activities" around the periphery of the park ⁽⁷⁾.

The new reformation era of Indonesian politics has shifted some of the power to those who wish to oppose the law for political or financial reward. Communities are becoming more aware that there is an opportunity for them to take some control over the land and in some areas the law is breaking down.

Coupled with this are local timber barons with military and police support, who are exploiting this current power vacuum. Anarchy is to their financial advantage and they are prepared to stir the local communities to further their aims. In reality, they are running away with most of the local resources and paying the local people a pittance to break the law on their behalf. Authoritarian oppression of the people has been replaced by financial and resource exploitation.

The LMU sees the new era as a useful chance for it to extend its community programmes, but it suffers from a perception that it is part of the old establishment. Many local people see the LMU as chiefly a donor agency, a perception that is reinforced by EU funding restrictions. The fact that the project has to purchase EU vehicles for transportation leads to the staff driving around in "alien" green Landrovers, and further reinforces the donor perception of their work.

Co-operation with some other authorities has clearly broken down. It is common knowledge that tensions exist with the Forest Department, partly because it is making too much money out of the forests to be interested in LMU's long-term goals. Enforcement authorities have failed to react to LMU's recent calls to stop illegal logging at the Suaq Balimbing Research Station.

Adding to the LMU's difficulties is the freezing of much of the EU's grant since November 1998 and the failure of the Indonesian government to pay its share. This has had a very serious affect on the ground, where LMU staff have attempted to help some communities by making financial promises which they cannot now keep ⁽⁸⁾. In these cases, resentment amongst local people to the LMU and the park is growing. It is claimed that illegal logging in the Suaq Balimbing Research Station started immediately after the LMU failed to turn up to two local community meetings ⁽⁹⁾.

jangkauan program kemasyarakatannya. Akan tetapi, kehadiran LMU kerap disalahartikan sebagai kepanjangan tangan dari rejim lama. Sebagian besar masyarakat lokal melihat LMU sebagai badan dana, suatu persepsi yang diperkuat oleh pembatasan-pembatasan pendanaan EU. Misalnya, proyek LMU diharuskan untuk membeli kendaraan buatan Eropa untuk alat transportasinya. Akibatnya saat ini staf LMU berkendara kemana-mana dengan menggunakan jip Landrover warna hijau, dengan kesan dan atribut yang khas dan "asing" tersebut. Tak terhindarkan lagi, kesan sebagai donatur semakin kuat.

Kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah juga tidak berjalan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat ketegangan antara LMU dengan pejabat-pejabat Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Sebagian alasannya adalah karena pejabat-pejabat Departemen Kehutanan lebih berminat untuk mencetak uang dengan menguras sumber daya hutan, ketimbang tertarik dengan sasaran jangka panjang LMU. Aparat penegak hukum juga gagal menanggapi seruan terakhir LMU agar penebangan liar di Stasiun Penelitian Suaq Balimbing dihentikan.

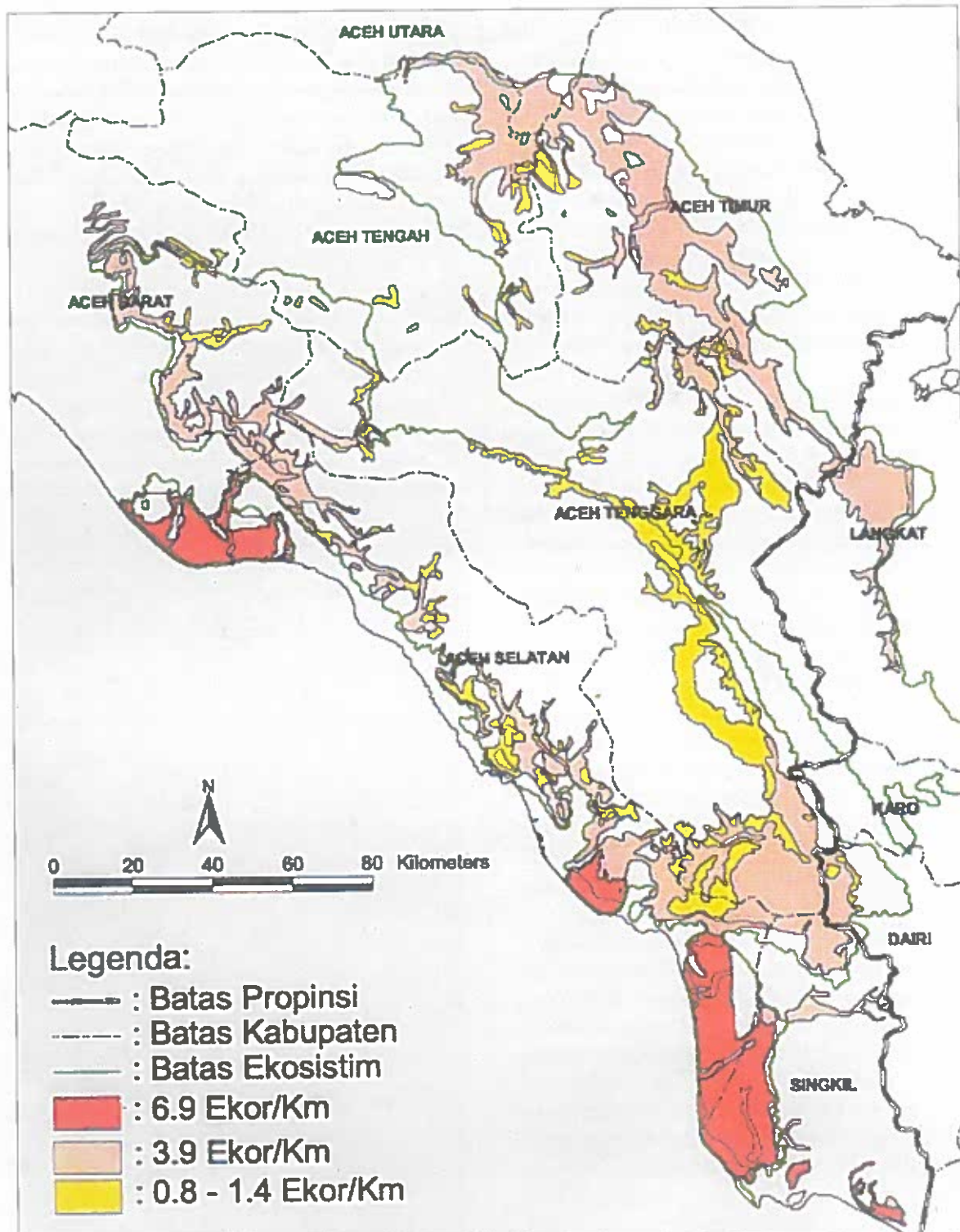
Kesulitan LMU semakin bertambah dengan pembekuan sebagian besar dana EU sejak bulan November 1998 dan kegagalan pemerintah Indonesia untuk membayar bagiannya. Kenyataan ini menimbulkan akibat yang sangat serius di lapangan. Terutama karena staf LMU telah menjanjikan bantuan keuangan kepada masyarakat lokal, sesuatu yang kemudian tidak dapat mereka penuhi ⁽⁸⁾. Kasus-kasus seperti ini membuat penolakan masyarakat setempat terhadap LMU dan taman nasional semakin berkembang. Ada yang menyatakan bahwa penebangan liar di Stasiun Penelitian Suaq Balimbing berlangsung tidak lama setelah kegagalan LMU untuk hadir dalam 2 rencana pertemuan dengan masyarakat setempat ⁽⁹⁾.

Ketidakstabilan politik di Propinsi Aceh semakin menambah masalah di taman nasional. Dalam era reformasi ini pemberdayaan masyarakat setempat merupakan faktor penting di seluruh Indonesia. Tetapi di Aceh gerakan kemerdekaan juga hadir menyemarakkan pecahan politik dan kesimpangsiuran hukum yang selama ini merupakan pemandangan sehari-hari. Keterlibatan militer dan polisi dalam kegiatan penebangan liar telah terdokumentasikan dengan baik, menciptakan struktur kekuasaan yang sulit untuk diputuskan baik secara regional maupun lokal.

"...Pemberdayaan masyarakat setempat merupakan fahtor penting..."

Right:
Map showing orangutan
distribution in Northern
Sumatra

Peta yang menunjukkan
distribusi orangutan di
Sumatra Bagian Utara



The Orangutans of the Swamps of Aceh Province

Unique and extraordinary, the orangutans of the Kluet swamp in Aceh have been regularly observed using tools made from branches to extricate food from holes in trees, bee's nests and the well protected *Neesia* fruits. This kind of behaviour has never been seen in orangutans from other areas.

Besides their use of tools, the orangutans

Orangutan di Daerah Rawa Propinsi Aceh

Orangutan di daerah rawa Kluet di Aceh adalah unik dan istimewa. Penelitian yang terus berlangsung sampai saat ini menunjukkan bukti bahwa orang utan di lokasi ini menggunakan peralatan dari ranting kayu untuk mengambil makanan dari lubang di pohon, sarang tawon dan buah *Neesia* yang terlindungi dengan baik.

of the Aceh swamps are also found in very high population densities. It is believed that this may be due to the high food productivity of the swamp forest supporting high numbers of orangutans, which in turn has created social groupings. This is unheard of in Borneo where orangutans are usually regarded as solitary ⁽¹⁰⁾.

The populations of these unique creatures have been severely hit by partial logging of their habitat. Even prior to the illegal logging onslaught breaking out in May it was estimated that only 49% of the original habitat remains and only 48% of the estimated number of orangutans. In total, only around 2,500 orangutans are believed to remain in the three swamp areas of Aceh ⁽¹¹⁾. With the current logging activities this number could be much less.

Until recently the Kluet and Singkil swamps were the last two intact swamps in the whole ecosystem. Illegal logging activities have now rapidly degraded these swamps as well. Globally, the ecological significance of these areas is very high. About 80% of the world's freshwater peat swamps are in Indonesia and already about 80% of these have been lost ⁽¹²⁾.

The importance of these swamps to orangutan conservation cannot be underestimated. Orangutan population density maps of the area show the highest concentrations to occur where the three swamps are found. If the logging is allowed to continue, the majority of the orangutan population will rapidly disappear, only remaining in much lower densities on higher land.



Perilaku ini tidak pernah teramati pada orangutan di daerah lain.

Selain kemampuan menggunakan peralatan, orangutan dari daerah rawa Aceh juga hidup di daerah yang sangat padat populasinya. Diperkirakan hal ini disebabkan oleh produktivitas yang tinggi dari hutan rawa yang menunjang padatnya populasi orangutan. Pada gilirannya fenomena ini menciptakan pengelompokan sosial. Hal ini tidak pernah teramati di Kalimantan dimana orangutan biasanya dianggap sebagai mahluk soliter (penyendiri) ⁽¹⁰⁾.

Populasi dari mahluk yang unik ini sangat terpukul oleh penebangan hutan yang berlangsung di sebagian habitat mereka. Bahkan sebelum maraknya penebangan liar sejak bulan Mei tahun lalu, diperkirakan hanya 49% habitat asli yang masih tersisa dan hanya 48% orangutan yang ada dari jumlah total yang diperkirakan. Secara keseluruhan, hanya terdapat 2.500 orangutan di tiga daerah hutan rawa Aceh ⁽¹¹⁾. Gencarnya penebangan hutan yang terus berlangsung akhir-akhir ini kemungkinan sudah membuat jumlah tersebut semakin jauh berkurang.

Hingga akhir-akhir ini rawa-rawa Kluet dan Singkil merupakan dua daerah rawa yang masih asli dari keseluruhan ekosistem (Leuser). Akan tetapi penebangan liar juga telah merusak kawasan ini dengan cepat. Daerah rawa ini sangat penting dalam ekologi global. Sekitar 80% daerah rawa air payau dunia terdapat di Indonesia dan 80% diantaranya sudah punah ⁽¹²⁾.

Pentingnya rawa ini bagi konservasi orangutan juga tidak dapat dianggap remeh. Peta kepadatan populasi orangutan daerah ini menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi terdapat pada tiga daerah rawa tersebut. Jika penebangan masih dibiarkan berlangsung, mayoritas populasi orangutan akan punah dengan cepat, hanya tersisa di daerah yang tidak terlalu padat di dataran tinggi.

*Left:
Sumatran orangutans
have been observed using
tools*

*Orangutan di Sumatra
telah diamati dapat
menggunakan peralatan*

“Military and police involvement in illegal logging is well documented”

The political instability of Aceh Province creates additional problems for the park. Local community empowerment is an important factor throughout Indonesia in the current period of reformation, but in Aceh an independence movement also exists creating more political factions and routine lawlessness. Military and police involvement in illegal logging is well documented creating a power structure both regionally and locally which is difficult to break.

Illegal Logging in the Swamps

There is widespread illegal logging in the swamps of South Aceh, which has increased during the power vacuum caused by the resignation of President Soeharto ⁽¹³⁾. Local timber barons have encouraged the communities to break the law by providing them with chainsaws and loans for food and supplies.

Less fear of authority has given local people greater courage to break the law without expecting repercussions. In some areas there is virtual anarchy, but the old power structure is still not far behind. Involvement of the various law enforcement agencies in the illegal logging continues, including the Forest Police and Conservation Department (PKA, formerly known as PHPA), the army and the police. This involvement ranges from actively organising illegal logging to taking bribes to turn a blind eye ⁽¹⁴⁾.

*Below:
Loggers removing a tree
from the Suaq
Balimbing research area*

*Para penebang liar
mengeluarkan sebatang
pohon dari kawasan
penelitian Suaq
Belimbing*



Penebangan Liar di Daerah Rawa

Penebangan liar terjadi dimana-mana di daerah rawa-rawa Aceh Selatan. Selama masa kekosongan kekuasaan menyusul mundurnya Presiden Soeharto kegiatan ini semakin merajalela ⁽¹⁵⁾. Raja kayu lokal mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan melanggar hukum ini dengan menyediakan perangkat gergaji (chainsaw) dan pinjaman uang untuk membeli makanan dan perbekalan.

Perangkat hukum yang tidak bergigi mendorong masyarakat untuk melanggar hukum tanpa takut terhadap akibatnya. Di beberapa daerah kentara sekali perilaku anarkis ini. Di lain pihak, struktur kekuasaan yang lama masih tidak terlalu jauh ditinggalkan. Keterlibatan berbagai perangkat penegak hukum dalam kegiatan penebangan liar masih berlanjut, seperti Polisi Hutan (Jagawana) dan petugas-petugas lainnya dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, termasuk petugas dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA, dulu dikenal sebagai PHPA), tentara dan polisi. Keterlibatan mereka mulai dari secara aktif mengatur kegiatan penebangan liar sampai pada mengutip uang suap, kemudian pura-pura tidak tahu dengan pelanggaran hukum yang terjadi.

Rawa Tripa

Ketiga daerah rawa di Aceh berangsur-angsur rusak. Daerah yang paling utara, rawa Tripa, tidak dilindungi dan rusak sebagai akibat konsesi yang sebelumnya dimiliki oleh PT Dina Maju dan yang sekarang masih aktif oleh PT Gruti, yang memiliki kaitan erat dengan PT Mujur Timber.

PT Mujur Timber dari awal adalah perusahaan yang bermasalah. Anak perusahaannya di Sumatera Barat, PT Duta Maju Timber, telah memanipulasi batas Taman Nasional Kerinci Sebelat sehingga mereka memperoleh alasan untuk bisa menebang kayu di kawasan tersebut. Menanggapi hal ini suatu tim investigasi gabungan antara Departemen Kehutanan dan Bank Dunia telah dibentuk untuk menyelusuri seluruh kawasan dan memeta ulang daerah penebangan hutan untuk membuktikan bahwa PT Mujur Timber telah melakukan penebangan liar di kawasan yang dilindungi tersebut pada tahun kedua operasinya ⁽¹⁶⁾.

Rawa Singkil

Suatu tim yang melapor kepada LMU menulis dalam laporannya bahwa Rawa Singkil

Tripa Swamp

All three swamp areas in Aceh are already degraded with the northernmost Tripa swamp unprotected and affected by a former concession which was owned by PT Dina Maju and an active concession run by PT Gruti, a division of PT Mujur Timber.

Mujur Timber has already been seriously implicated through its company PT Duta Maju Timber in West Sumatra in misrepresenting the borders of the Kerinci Seblat National Park on its maps so as to log within it. In this case it took a joint investigation team by the Ministry of Forestry and the World Bank to hike throughout the area and re-plot the logging area to prove that Mujur Timber were illegally logging this protected area for the second year running ⁽¹⁵⁾.

Singkil Swamp

The Singkil Swamp is suffering “ubiquitous timber poaching at each and every of the sites visited or rivers surveyed” by a recent team reporting to the LMU. They found that along the Simpang Kiri / Alas river “there are virtually no areas left that are not seriously degraded.” Even along the inaccessible west coast illegal logging was taking place ⁽¹⁶⁾. This is despite the area having protected status.

The swamp has also been logged by two concession holders, one of which is Alas Aceh Perkasa and is still active in the area. This company is owned by Mujur Timber.

Kluet Swamp

A joint team from EIA, Telapak Indonesia and Yayasan Leuser Lestari (YLL) visited the Kluet Swamp area within the Gunung Leuser National Park and the surrounding area formerly under the control of concession holder PT Medan Remaja Timber (PT MRT). They met with villagers, illegal loggers, community leaders, the local governor (bupati) and researchers at the Suaq Balimbing Research Station. While trekking the team saw areas of the National Park devastated by logging, heard chainsaws in most directions, witnessed the felling of trees within the park and learned the location of some of the sawmills receiving the stolen logs. They visited one sawmill owned by Mr Siao – reputed to be the biggest timber baron in the area.

Logging teams build their camps within the National Park boundaries and destroy many trees to clear an area and build their structures. The local people are working for a pittance and are

mengalami “penjarahan kayu yang merajalela di seluruh penjuru kawasan yang dikunjungi atau sungai yang disurvei”. Mereka menemukan bahwa sepanjang Simpang Kiri/sungai Alas “pada dasarnya tidak ada sejenkalpun daerah yang tidak rusak”. Bahkan sepanjang pantai barat yang sulit dimasuki pun telah berlangsung penebangan liar ⁽¹⁶⁾. Walaupun kawasan tersebut berstatus sebagai kawasan yang dilindungi, perusakan itu tetap terjadi.

Rawa Kluet

Tim gabungan dari EIA, Telapak Indonesia dan YLL mengunjungi Rawa Kluet di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan sekitarnya. Dahulu kawasan ini dikelola oleh pemegang Hak perusahaan Hutan (HPH) PT Medan Remaja Timber (PT MRT). Tim bertemu dengan masyarakat lokal, pelaku penebangan liar, pemuka masyarakat, Bupati Aceh Selatan, dan para peneliti di Stasiun Penelitian Suaq Balimbing. Sambil menyelusuri kawasan tim ini menyaksikan betapa kawasan taman nasional ini telah rusak oleh kegiatan penebangan. Suara chainsaw terdengar dari segala penjuru. Dengan mata kepala sendiri tim ini juga melihat pohon-pohon yang tumbang (karena ditebang) di dalam kawasan taman nasional dan menemukan lokasi kilang kayu (sawmill) yang menampung kayu curian. Tim ini juga mengunjungi satu sawmill milik Bapak Siao, yang dikenal sebagai raja kayu

*Below:
Destruction in the Suaq
Balimbing area*

*Kerusakan di Kawasan
Penelitian Suaq
Balimbing*



© Dave Curry - EIA/Telapak

Right:
Timber unloaded outside
a sawmill owned by Siao
– implicated in the
illegal logging

Kayu sedang dibongkar
muat di sawmill milik
Siao – cukong yang
terlibat dalam illegal
logging



forced to take loans for their food and cigarettes while in the forest. This ties them to a particular timber baron who also pays off the local enforcement authorities.

The two man logging teams are tied to the local sawmill owners, who are the main force behind the timber theft. The loggers work out of a camp with a number of other teams and are provided with the chainsaw and fuel. The team leader will borrow Rp 150,000 - 200,000 (US\$23-30) per week to provide food and cigarettes for him and his assistant. The team leader pays Rp 10,000 (US\$1.50) to his assistant per day. They can cut at least one tonne of timber per day (approximately one cubic metre) for which the team leader is paid Rp 60,000 (US\$9). If they cut the minimum of seven tonnes each week the team leader will receive Rp 175,000 (US\$27) after paying his assistant and repaying the credit to the sawmill owner⁽¹⁷⁾.

Not only is this work illegal, it is gruelling and the workers live and sleep in the forest seven days a week. In their ramshackle temporary shelters the loggers are easy prey to an array of biting and stinging insects, and have to endure leeches and possible snake bites.

While the logging team gets just Rp 60,000 for each tonne, the sawmill owner can sell one tonne of timber for Rp350,000 - 400,000 (US\$54-\$62)⁽¹⁸⁾.

Loggers working in the protected forest explained that the timber they cut all goes to sawmills owned by Mr Siao. He has five sawmills located at Kota Fajar, Pasir Lembang,

terbesar di daerah itu.

Kelompok penebang mendirikan *camp* (*pangkalan*) mereka di dalam kawasan taman nasional. Untuk membangun camp itu mereka membuka hutan dengan menebang banyak pohon. Penebang, yang sebagian besar merupakan masyarakat setempat, hanya mendapat bayaran minimal dan terpaksa berhutang untuk membeli makanan dan rokok selama di hutan. Hutang ini menjadi pengikat mereka dengan raja kayu tertentu yang juga harus menyuap perangkat penegak hukum.

Satu regu penebang terdiri dari 2 orang. Regu penebang ini terikat dengan pemilik *sawmill* lokal tertentu. Para pemilik sawmill inilah yang merupakan kekuatan utama dibalik kegiatan penebangan kayu. Para penebang bekerja di hutan dan tinggal di camp dengan sejumlah regu lain. Mereka mendapat jatah *chainsaw* dan bahan bakar. Untuk membeli makanan dan rokok bagi mereka, pimpinan regu akan meminjam antara Rp. 150.000 - 200.000,- se minggu. Kenek atau asisten tebang akan mendapat bayaran Rp.10.000 setiap hari dari pimpinan regu. Mereka bisa menebang sedikitnya satu ton kayu per hari (sekitar satu meter kubik), dimana pimpinan regu mendapat Rp.60.000,-. Jika mereka menebang sedikitnya tujuh ton setiap minggu, maka pimpinan regu akan mendapat Rp.175.000,- setelah dikurangi bayaran untuk asisten dan melunasi hutang kepada pemilik sawmill⁽¹⁷⁾.

Selain ilegal, pekerjaan ini juga berat. Penebang tinggal dan tidur di hutan selama

Bakongan and Paya Laba .

In addition to Mr Siao, the loggers claimed that other sawmill owners with loggers in the Park are Mr Ja'i of Paya Laba, Mr Suhaimi from Kandang, Mr Darto from Medan, and Mr Kamal of Pasir Lembang.

The Kluet swamp is the site of the unique Suaq Balimbing Research Area. This internationally renowned research site lies within the National Park and has been the home for scientists under Prof. Carel van Schaik since the early 1990s. He fears that the spate of illegal logging will destroy the unique behavioural traits, such as the use of tools, observed in the orangutan population which are known to be critically dependent on the proper environmental conditions. Van Schaik believes the very survival of the orangutans of Suaq Balimbing is threatened ⁽¹⁹⁾.

Logging started in the park area soon after the downfall of President Soeharto, but on a relatively small scale. It did not spread into the research station until March 1999. By July it was estimated that about 100 loggers were operating within the study area, based at 24 logging camps and using a system of 20 rails to pull the logs out ⁽²⁰⁾.

Two of the three most important food trees for orangutans in the area have been heavily logged. It is estimated that 50-66% of the *Neesia* trees and 25-33% of *Sandoricum beccarianum* have been cut in the study area ⁽²¹⁾.

The complete failure of the LMU to gain support from the authorities and the community to stop the illegal logging demonstrates the lack

tujuh hari seminggu. Di kemah pangkalan mereka yang sederhana para penebang sangat mudah tersengat serangga, dan mereka harus menanggung gigitan lintah atau bahkan mungkin ular.

Sementara para penebang hanya mendapat Rp.60.000,- untuk setiap ton, pemilik *sawmill* dapat menjual satu ton kayu seharga Rp. 350.000,- – 400.000,- ⁽¹⁸⁾.

Para penebang lindung menjelaskan bahwa kayu-kayu yang mereka tebang semuanya disalurkan ke *sawmill* milik Bapak Siao. Ia memiliki lima *sawmill* yang tersebar di Kota Fajar, Pasir Lembang, Bakongan dan Paya Laba.

Selain Bapak Siao, para penebang menyatakan pemilik *sawmill* lainnya yang juga mempekerjakan penebang di taman nasional adalah Bapak Ja'i dari Paya Laba, Bapak Suhaimi dari Kandang, Bapak Darto dari Medan, dan Bapak Kamal dari Pasir Lembang.

Rawa Kluet merupakan bagian kawasan penelitian Suaq Balimbing yang unik. Kawasan penelitian yang kondang secara internasional ini terdapat di dalam kawasan taman nasional dan sejak lama menjadi pangkalan bagi para peneliti dibawah koordinasi Prof. Carel van Schaik sejak awal tahun 1990an. Ia kuatir kegiatan penebangan hutan secara liar akan mengganggu perilaku orangutan yang unik, seperti penggunaan peralatan dalam perilaku orang utan di lokasi itu. Perilaku ini diketahui sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang sesuai. Van Schaik yakin kelangsungan hidup orangutan Suaq



Left:
Illegal logger in the Kluet
Swamp

*Penebang liar di daerah
Rawa Kluet*

of local support for the programme. The current power vacuum has led to a situation where the authorities drop any pretence at even trying to deal with the problem of illegal logging. It is no wonder that the sawmill owners can send the loggers in with impunity.

Meetings held between various authorities and the loggers resulted in an ultimatum, which was more a case of bravado than a sense of reality. The loggers were told they could remove their illegally felled timber but must stop their activities. Most ignored the ultimatum and logging continues.

Successful Community action against PT MRT

The problem of illegal logging in the swamp areas is symptomatic of the abuse that the forests in the Leuser ecosystem have endured for many years. This fragile ecosystem is surrounded by 13 separate logging concession companies, some of which have recently ceased operations. A number of these companies have broken the regulations governing forestry practices within their concessions ⁽²²⁾.

One such case was PT Medan Remaja Timber (PT MRT) which ran a concession bordering the Kluet swamp. Workers from this company were found logging within the National Park by investigators from YLL who also found an oil palm plantation and a sawmill within the concession area. Both these activities are illegal. Additionally, timber was being cut near water sources and on slopes with steep gradients ⁽²³⁾.

*Below:
Logging on a slope in PT
MRT's concession*

*Penebangan di
kemiringan yang
dilakukan oleh PT MRT*



Balimbing sangat terancam ⁽¹⁹⁾.

Penebangan berlangsung di kawasan itu tidak lama setelah Presiden Suharto mengundurkan diri, tetapi hanya dalam skala yang relatif lebih kecil. Sampai bulan Maret 1999 kegiatan itu tidak merambah sampai ke Stasiun Penelitian. Pada bulan Juli diperkirakan sekitar 100 penebang telah merambah hingga ke dalam kawasan penelitian. Mereka membangun 24 pangkalan penebangan dan menggunakan sistem rel untuk menarik kayu gelondong keluar dari kawasan ⁽²⁰⁾.

Dua dari tiga pohon yang penting sebagai makanan orangutan di kawasan tersebut telah banyak ditebang. Diperkirakan 50-66% pohon *Nesia* dan 25-33% *Sandoricum beccarianum* telah ditebang di kawasan penelitian ⁽²¹⁾.

Kegagalan LMU untuk menggagalkan dukungan untuk menghentikan penebangan liar menunjukkan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan masyarakat lokal terhadap program tersebut. Kekosongan kekuasaan yang terjadi baru-baru ini telah mendorong aparat pemerintah untuk menanggalkan semua kepura-puraan, bahkan juga dalam upaya mencoba mengatasi masalah penebangan liar. Tidak heran jika para pemilik *sawmill* dapat mengirim para penebang kayu tanpa takut akan hukuman.

Pertemuan antara berbagai aparat pemerintah dan penebang kayu berakhir dengan suatu ultimatum, yang lebih merupakan 'unjuk gigi' daripada karena alasan yang berpijak pada kenyataan. Para penebang diperbolehkan untuk membawa kayu tebangan liar mereka tetapi mereka harus menghentikan kegiatan penebangan. Namun sebagian besar tidak menghiraukan ultimatum tersebut dan kegiatan penebangan terus berlangsung.

Keberhasilan Aksi Masyarakat Melawan MRT

Masalah penebangan liar di kawasan rawa telah menggejala dalam bentuk perusakan hutan di kawasan Leuser selama bertahun-tahun. Ekosistem yang rentan ini dikelilingi oleh 13 perusahaan penebangan kayu, beberapa diantaranya baru-baru saja menghentikan kegiatannya. Sejumlah perusahaan ini telah melanggar peraturan yang mengatur praktek-praktek kehutanan dalam wilayah konsesi mereka ⁽²²⁾.

Salah satu kasus adalah PT Medan Remaja Timber (MRT) yang memiliki konsesi di perbatasan rawa Kluet. Para pekerja perusahaan ini ditemukan telah menebang pohon di dalam kawasan taman nasional oleh para investigator dari YLL yang juga menemukan perkebunan kelapa sawit dan sebuah *sawmill* di dalam

YLL has provided detailed reports to the authorities on the illegal activities of PT MRT since 1996, and enlisted the support of local communities hit by PT MRT's flagrant disregard for the law. Communities downstream of the concession area endured serious hardships, believed to be due to PT MRT's illegal operations ⁽²⁴⁾. A flood that destroyed a school building in the village of Kandang was blamed on PT MRT. Farmers suffered from irrigation problems, and a logging road was built straight through a village's crops without talking to the villagers. These arrogant actions by the company sparked local protests, which escalated into company buildings being burned, a logging road being blocked and the seizure of a bulldozer ⁽²⁵⁾.

A local community leader took the evidence and grievances to Jakarta and successfully lobbied the Ministry of Forestry to close this concession down ⁽²⁶⁾. The company is appealing against the closure with the support of the chief of the Forest Department in Aceh Province – the only authority that opposed the closure despite the evidence ⁽²⁷⁾.

wilayah konsesi. Kedua kegiatan ini yang terakhir ini tentu saja melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka juga menebang pohon di dekat sumber air dan pada tebing curam ⁽²³⁾.

YLL telah menyusun laporan terinci untuk berbagai instansi pemerintah tentang kegiatan ilegal yang dilakukan oleh PT MRT ini sejak tahun 1996, dan mendukung masyarakat setempat menentang tindakan PT MRT yang jelas-jelas melanggar hukum. Sungai yang sangat penting bagi masyarakat, yang mengalir di dalam kawasan konsesi juga terganggu. Hal ini diyakini sebagai akibat praktek penebangan liar yang dilakukan oleh PT MRT ⁽²⁴⁾. Banjir yang menghancurkan gedung sekolah di desa Kandang dituduhkan sebagai akibat kegiatan PT MRT. Petani mengalami masalah irigasi, dan jalan untuk keluar masuk truk pembawa kayu dibangun tepat melintasi kebun-kebun masyarakat tanpa minta ijin penduduk desa. Sikap perusahaan yang angkuh ini memancing protes masyarakat lokal, yang memuncak dengan pembakaran sebuah gedung milik perusahaan, jalan keluar-masuk truk kayu ditutup, dan sebuah bulldozer disandera ⁽²⁵⁾.

Seorang pemuka masyarakat setempat membawa bukti-bukti pelanggaran dan cerita-cerita penderitaan ini ke Jakarta dan berhasil meminta Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk menutup perusahaan ini ⁽²⁶⁾. Perusahaan ini mengajukan gugatan hukum dengan dukungan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Aceh – satu-satunya aparat pemerintah yang secara terbuka menentang penutupan perusahaan tersebut, walaupun bukti sudah berbicara banyak ⁽²⁷⁾.



Left:
Sawmill owned by PT MRT

Sawmill milik PT MRT

Conclusions

- The illegal logging in two of Indonesia's most important protected areas – Tanjung Puring National Park and Gunung Leuser National Park – is out of control and orchestrated by timber barons, members of the military, police and the forest department. The situation is exacerbated by the fact that the current wave of logging is not simply a recent reaction to the country's political vacuum, but an acceleration of entrenched illegal activities, corruption and collusion which have defined Indonesia's forest practices for the past three decades.
- Local communities, although involved in the illegal logging, are merely reacting to the climate of corruption that has surrounded them for years. In many instances the illegal logging is a consequence of the marginalisation and alienation of local people from their rights to forest resources. The loggers themselves are being recruited in increasing numbers to create chaos in the forests, to the continuing profit of the timber barons and corrupt officials behind the massive timber theft. The situation is so bad that illegal logging now outstrips legal timber production in Indonesia.
- This short-term pillaging of the forests is the legacy of a system that has seen the country's forest resources carved-up between a few members of the power elite, a system the international community failed to condemn. Despite publicity of the recent destruction in Indonesia's National Parks, there has been no outcry from other governments.
- This rapid onslaught is tearing the heart out of Indonesia's few remaining islands of biodiversity as well as removing future potential for local communities. The environmental fall-out is causing an incalculable loss in terms of priceless biodiversity and pushing the orangutans of Indonesia ever closer to extinction.

Recommendations

The logging of the National Parks must be stopped immediately. This must be done in the context of the following actions:

- Closure of illegal sawmills and immediate audit of licensed sawmills in the vicinity of the Parks. Immediate investigations and prosecution of owners of sawmills proven to be acting illegally.
- Major international donors, including the USA, the European Union, Japan, the IMF and World Bank, must be held responsible for upholding actions to stop illegal logging and reform forestry law.
- Investigation into corruption of the authorities, including the police, military and Forestry department in the local area, the provinces and central government in Jakarta. Prosecution and replacement of individuals, including those at the highest level.
- An alternative forestry law taking into account local community rights, local participation in forestry, and recognition of land claims.
- Establishment of a Consultative Forestry Council with real moral authority and power to provide a medium for forestry issues to be resolved between all the stakeholders at a national, regional and local level.
- Strengthening PKA (Forest Police and Conservation Department) in areas of management and establishing park boundaries through participatory mapping. Create an enterprise spirit that includes the community, wildlife and forest conservation and tourism.
- The international community must take responsibility for their consumption of illegally produced timber from Indonesia.

Kesimpulan

- Penebangan liar di dua kawasan lindung yang paling penting di Indonesia – Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Gunung Leuser – sudah mencapai taraf yang luar biasa. Penebangan liar tersebut didalangi oleh para raja kayu, anggota militer, polisi dan petugas kehutanan. Situasi ini diperparah dengan kenyataan bahwa maraknya penebangan liar akhir-akhir ini bukan hanya merupakan reaksi terhadap kekosongan politik di Indonesia, tetapi lebih merupakan peningkatan kegiatan-kegiatan ilegal yang semakin meruyak, ditambah dengan korupsi dan kolusi yang sudah menjadi wajah praktek kehutanan di Indonesia sejak tiga dekade terakhir.
- Walaupun masyarakat setempat terlibat dalam penebangan liar, mereka semata-mata bereaksi terhadap iklim korupsi yang melingkupi kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Pada banyak kasus, penebangan liar merupakan akibat penyingkiran dan pengasingan masyarakat setempat dari hak-hak mereka atas sumber daya hutan. Para penebang dipekerjakan dalam jumlah besar untuk menciptakan kekacauan di hutan. Pada gilirannya kekacauan itu akan terus mendatangkan keuntungan bagi para raja kayu dan petugas yang korup dibalik pencurian kayu besar-besaran tersebut. Situasi ini sudah begitu buruknya sehingga bahkan kini volume kayu hasil penebangan liar jauh melampaui volume produksi kayu yang resmi di Indonesia.
- Perusakan hutan dalam waktu singkat ini merupakan sisa-sisa suatu sistem dimana sumber daya hutan dikuasai dan dikuras sepenuhnya oleh negara dan segelintir elit kekuasaan, suatu sistem yang selama ini dibiarkan saja berlangsung oleh masyarakat internasional. Walaupun akhir-akhir ini kerusakan Taman Nasional di Indonesia sudah menjadi berita dimana-mana, sampai sekarang tidak ada satupun pemerintah negara lain yang bereaksi.
- Serangan cepat ini mengoyak jantung keanekaragaman hayati Indonesia yang hanya tinggal sedikit tersisa. Selain itu juga menggeser bekal masa depan untuk masyarakat lokal. Masalah lingkungan ini menyebabkan kehilangan yang tidak terhitung akan keanekaragaman hayati yang sangat berharga dan semakin mendorong orang-orang Indonesia ke jurang kepunahan.

Rekomendasi

Penebangan di kawasan Taman Nasional harus dihentikan dengan segera. Hal ini perlu dilakukan dalam konteks tindakan berikut ini:

- Penutupan sawmill liar dan pelaksanaan audit dalam waktu sesegera mungkin terhadap sawmill yang memiliki ijin di sekitar Taman Nasional. Penyelidikan segera dan penindakan hukum terhadap pemilik sawmill yang terbukti melanggar hukum.
- Lembaga-lembaga donor internasional, khususnya USA, Masyarakat Eropa, Jepang, IMF dan Bank Dunia harus turut bertanggung jawab untuk memastikan dihentikannya penebangan liar dan tercapainya reformasi kehutanan di Indonesia.
- Penyelidikan terhadap tindak korupsi yang dilakukan aparat pemerintah, seperti polisi, aparat militer dan petugas kehutanan setempat, di tingkat propinsi dan di pemerintah pusat Jakarta. Tindakan hukum dan penggantian aparat, termasuk mereka yang berada di posisi teratas.
- Undang-undang pengelolaan kehutanan alternatif yang menghargai hak-hak masyarakat adat, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kehutanan, dan pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya hutan.
- Pembentukan Dewan Musyawarah Kehutanan dengan kewenangan politik dan otoritas moral yang memadai sebagai wahana untuk menampung berbagai persoalan kehutanan dan menyelesaikannya di antara para pemangku (stakeholders) baik di tingkat nasional, regional dan lokal.
- Penguatan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) khususnya dalam hal pengelolaan (termasuk khususnya penetapan batas-batas secara partisipatif) taman nasional. Membangun semangat wiraswasta yang melibatkan masyarakat, masyarakat liar dan konservasi hutan dan pariwisata.
- Masyarakat internasional harus bertanggung-jawab atas konsumsi kayu ilegal dari Indonesia.

References

Indonesia's Disappearing Forests

1. Food and Agriculture Organisation, State of the World's Forests, 1997
2. Consultative Group on Indonesian Forestry, Jakarta, 1996
3. Hasnudin, The State of Indonesia's Forests, WALHI, 1996
4. Bryant et al, The Last Frontier Forests, World Resources Institute, 1997
5. Jakarta Post, 23/6/1999
6. Pers comm, George Adijondrn, 17/8/97
7. Environmental Investigation Agency, The Politics of Extinction, 1998
8. F.Siegert and A. Hoffmann, Evaluation of the 1998 Forest Fires in East Kalimantan Using Multitemporal ERS-2 SAR Images and NOAA-AVHRR data, 1999
9. Jakarta Post, 18/12/94
10. Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme, A draft position paper on threats to sustainable forest management in Indonesia: Roundwood Supply and Demand and Illegal logging, 1999
11. Poffenberger, Rethinking Indonesian Forest Policy, Asian Survey 1997
12. IUCN Red List of Threatened Animals 1996
13. MacKinnon, Primate Conservation, 1987
14. Nadler et al, The Neglected Ape, 1995
15. Down to Earth, August 1996

Towards Real Forest Reform

1. Hariadi Kartodihardjo, Forest Watch Indonesia, March 1999.
2. Pers Comm, confidential, 1/6/99
3. FKMM statement to the Bank Dunia, July 1999.
4. WALHI press release, 2/6/99
5. Draft alternative forestry bill, FKMM, 11/7/99
6. Jakarta Post, 28/7/99
7. Forest Watch Indonesia National Workshop, July 1998.

Tanjung Puting National Park

1. Herry Djoko Susilo, The Tanjung Puting National Park and Biosphere Reserve, South-South Co-operation Programme on Environmentally Sound Socio-Economic Development in the Humid Tropics, working paper 22, 1997
2. Dr Birute Galdikas and Dr Gary Shapiro, A Guidebook to Tanjung Puting National Park, 1994
3. E.Colijn, The Nature Reserves of Kalimantan
4. E. Meijaard, The Importance of Swamp Forest for the Conservation of the Orangutan in Kalimantan, Indonesia, in

J.Rieley and S Page, Biodiversity and Sustainability of Tropical Peatlands, 1997

5. Susilo 1997, op cit
6. Gatra magazine, 17/7/99
7. Tanjung Lingga Group, company brochure
8. Pers comm, confidential, 19/7/99
9. Pers comm, confidential, 10/7/99
10. Profil Industri Pengolahan Kayu Hulu - Sampai Dengan Januari 1997, Departemen Kehutanan Indonesia
11. Susilo, 1997, op cit
12. Kalteng Pos, 8/6/99
13. Profil Industri Pengolah Kayu Hulu, Sampai Dengan Januari 1997, op cit
14. Pers Comm, Theodore Dante, 26/7/99
15. World Conservation Monitoring Centre List of Threatened Trees
16. CITES Ninth Meeting of the Parties, Fort Lauderdale, USA, 7-18 November 1994 - plen 9.7
17. Ian Armitage and Muhammad Kuswanda, Forest Management for Sustainable Production and Conservation in Indonesia, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 1989.
18. Pers Comm, Paul Steenberg, F W Mason's, 7/7/99
19. Armitage and Kuswanda, 1989, op cit
20. Biro Pusat Statistik, Forestry Statistics
21. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia
22. Pers comm, Tim Keating, Rainforest Relief, 13/7/99
23. Pers comm PT Korindo Makmur 3/7/99, pers comm Focus Forest Products 9/7/99
24. Kalteng Pos, 18/5/99
25. Pers comm, Banjarmasin Post journalist, 11/6/99
26. Theodore Dante, Tim Penyelamatan Dan Pelestarian Taman Nasional Tanjung Puting, 25/6/99
27. Dante, 25/6/99, op cit
28. Pers comm, confidential, 30/6/99
29. Loggers in Tanjung Puting National Park, 2/7/99

Gunung Leuser National Park

1. Dr Kathryn Monk, LMU, "Leuser Ecosystem, Sumatra, Indonesia: Research Opportunities"
2. European Commission - Indonesia Forest Programme brochure, publ. By Forest Liaison Bureau, March 1999
3. Dr Kathryn Monk, LMU, "Leuser Ecosystem, Sumatra, Indonesia: Research Opportunities"
4. Dr Kathryn Monk, LMU, filmed interview, 7/7/99

5. Dr Kathryn Monk, Re: Swamps & orangutans, e-mail message, 22/7/99
6. Dr Kathryn Monk, LMU, "Leuser Ecosystem, Sumatra, Indonesia: Research Opportunities"
7. European Commission - Indonesia Forest Programme brochure, publ. By Forest Liaison Bureau, March 1999
8. Mike Griffiths, co-director, LMU, 7/7/99
9. Michelle Y. Merrill, personal communication, 3/7/99
10. Prof. Carel van Schaik, "Out of the Dark Ages", BBC Wildlife, November 1998
11. Prof. Carel van Schaik, "Integrating Eco-tourism with Conservation in the swamps in southern Aceh Selatan", Leuser Management Unit, March 1999
12. Mike Griffiths, co-director, LMU, 7/7/99
13. Prof. Carel van Schaik, "Situation at Orangutan Station Suaq Balimbing critical; orangutan viability in the wild increasingly questionable, press release, June, 1999
14. Prof. Carel van Schaik, "Integrating Eco-tourism with Conservation in the swamps in southern Aceh Selatan", Leuser Management Unit, March 1999
15. Joint MoFR World Bank Field Inspection Report of PT Duta Maju Timber & Bina Samaktha, August 1998
16. Prof. Carel van Schaik, "Integrating Eco-tourism with Conservation in the swamps in southern Aceh Selatan", Leuser Management Unit, March 1999
17. Loggers in Gunung Leuser National Park, personal communication, 6/7/99
18. Workers at Mr Siao's sawmill in Fajar Kota, Aceh Selatan, personal communication, 6/7/99
19. Prof. Carel van Schaik, "Situation at Orangutan Station Suaq Balimbing critical; orangutan viability in the wild increasingly questionable, press release, June, 1999
20. Michelle Y. Merrill, "Update on continued illegal logging at Suaq Balimbing"
21. Michelle Y. Merrill, "Update on continued illegal logging at Suaq Balimbing" <http://www.duke.edu/~myml1/suaq.htm> and personal communication 3/7/99
22. Map of logging concessions around Leuser Ecosystem, LMU
23. Report on IPT MRT, YLL, Dec. 1998
24. Radji, YLL, personal communication in Kandang, 5/7/99
25. Mahmudin & Baharuddin, chief and former village chief of Tapak Aulia, filmed interview, 4/7/99
26. Bestari Radin, filmed interview in PT MRT concession, 4/7/99
27. Pers comm, confidential 7/7/99



EIA UK
69 Old Street
London EC1V 9HX
tel 44-(0) 171 490 7040
fax 44-(0) 171 490 0436
email eiauk@gn.apc.org

EIA US
PO box 53343
Washington DC 20009
tel 1-202 483 6621
fax 1-202 483 6625
email eiaus@igc.apc.org

Telapak
Jl. Sempur Kaler No. 16
BOGOR 16154, INDONESIA
tel 62 251 320792
fax 62 251 351069
email telapak@indo.net.id